



**LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
ANGKATAN 1 TAHUN 2018**

**OPTIMALISASI ANALISIS RINGKAS CEPAT YANG
KOMPREHENSIF TERKAIT SIKLUS LAPORAN
SEMESTER APBN DAN DATABASE RENCANA
KERJA PEMERINTAH**

Oleh :

SLAMET DHUL FADLI, S.E.

NIP. 199405272018011003

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

2018

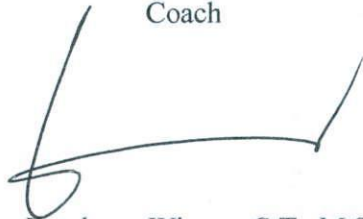
LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL AKTUALISASI “OPTIMALISASI ANALISIS RINGKAS CEPAT YANG KOMPREHENSIF TERKAIT SIKLUS LAPORAN SEMESTER APBN”

Nama : Slamet Dhul Fadli
NIP : 199405272018011003
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Instansi : Pusat Kajian Anggaran

Cisarua, 28 September 2018

Mengetahui,
Coach



Bambang Wiyoso, S.T., M.Si.
NIP.197204112005011001

Menyetujui,
Mentor



Rastri Paramita, S.E., M.M.
NIP.198001262014022002

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang mana atas bimbingannya maka penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS dan Pengetahuan Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI sebagai salah satu prasyarat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Laporan Aktualisasi ini dapat diselesaikan karena tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si., selaku Kepala Pusat Kajian Anggaran.
2. Mardi Harjo, S.E., M.Si., selaku Kepala Bagian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
3. Drs. Helmizar selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.
4. Bambang Wiyoso, S.T., M.Si., selaku *coach* PNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI.
5. Rastri Paramita, S.E., M.M., selaku mentor kegiatan Aktualisasi Diklatsar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI.
6. Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran, yang telah membantu memberikan saran dalam penyusunan Analisis Ringkas Cepat dan Infografis.

Laporan ini menyajikan dokumentasi atas proses pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh penulis sebagai Calon Analis APBN Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta pengetahuan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Maka laporan ini diharapkan besar kecilnya dapat memberikan kontribusi baik dari segi pemikiran/gagasan, maupun memperkaya referensi dan literature bagi pihak-pihak terkait.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 28 September 2018

Slamet Dhul Fadli, S.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kajian Anggaran	1
B Visi Misi Pusat Kajian Anggaran	2
C Tugas Pokok dan Fungsi Analis APBN Ahli Pertama	3
II RANCANGAN AKTUALISASI	4
A Deskripsi Isu	4
B Pemilihan Isu Prioritas	7
C Pemilihan Gagasan Prioritas	7
D Matriks Rancangan Aktualisasi	7
E Potensi Kendala Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi	14
F Rancangan Jadwal Kegiatan Aktualisasi	14
III PELAKSANAAN AKTUALISASI	15
A Matriks Pelaksanaan Aktualisasi	15
B Realisasi Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi	24
IV PENUTUP	26
A Kesimpulan	26
B Saran	27
C Rencana Tindak Lanjut	27
LAMPIRAN	38

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kajian Anggaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam menjalankan fungsinya terutama terkait fungsi anggaran, maka dibentuklah Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu unit *supporting system* di bawah Badan Keahlian DPR RI.

Pusat Kajian Anggaran dahulu merupakan bagian dari Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN yang berada di bawah Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan. Seiring dengan perubahan organisasi sistem pendukung dan dikeluarkannya Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI maka Pusat Kajian Anggaran resmi dibentuk. Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang perancangan APBN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kajian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran;
- g. Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran;
- h. Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;
- i. Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
- j. Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

B. Visi Misi Pusat Kajian Anggaran

Visi

”Menjadikan Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI bidang keahlian anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel”

Pusat Kajian Anggaran yang profesional mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Pusat Kajian Anggaran yang andal mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Anggaran menyusun misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
- b. Memperkuat manajemen pengetahuan.
- c. Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Analis APBN Ahli Pertama

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis APBN menyatakan bahwa yang dimaksud Analis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis APBN. Analis APBN termasuk dalam rumpun jabatan fungsional dimana jenjang jabatan fungsional Analis APBN terdiri dari Analis APBN Ahli Pertama, Analis APBN Ahli Muda, Analis APBN Ahli Madya, dan Analis APBN Ahli Utama. Untuk Analis APBN Ahli Pertama memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD sebagai anggota;
- b. Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan penggalian data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri, secara individual, sebagai anggota atau ketua tim;
- c. Menyusun Analisis Ringkas Cepat (ARC), secara individual, sebagai anggota atau ketua tim;
- d. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK, dan DPD, serta ARC.

BAGIAN II

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Deskripsi Isu

1. Belum Adanya Database Terkait Isu Pembahasan di Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Salah satu fungsi dari Pusat Kajian Anggaran adalah perumusan dan evaluasi program kerja tahunan dimana di dalam fungsi tersebut terdapat program kerja untuk melakukan kajian analisis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu hal yang memiliki hubungan erat dengan APBN adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Kerja Pemerintah merupakan komponen yang paling dasar dari pada penentuan APBN, rencana kerja yang merupakan bahan dari pada penyusunan APBN adalah berupa Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

Namun demikian, di Pusat Kajian Anggaran belum terdapat suatu sistem database untuk mengorganisir isu pembahasan Rencana Kerja Pemerintah setiap tahunnya. Padahal database ini menjadi sangat penting mengingat RKP bisa dijadikan acuan dalam membuat kajian analisa seputar APBN. Dengan adanya inovasi dalam pembuatan database isu pembahasan RKP, diharapkan para analis APBN akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan analisa terhadap APBN.

Sebagaimana pendapat Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita, 2011 (Dalam modul buku komitmen mutu;9) bahwa : “Inovasi barang dan jasa adalah cara utama dimana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan.” Inovasi dilandasi oleh keberanian berinisiatif untuk menampilkan kreativitas, sehingga inovasi akan menjadi faktor yang membuat organisasi tumbuh, berubah, berkembang, dan berhasil. (Komitmen Mutu).

2. Belum Optimalnya Kajian Tentang Isu Pembahasan Siklus Laporan Semester APBN

Berdasarkan Permenpan No. 39 Tahun 2014, Pusat Kajian Anggaran setiap tahunnya telah menerbitkan berbagai macam produk hasil analisis APBN, antara lain Analisis Ringkas Cepat (ARC), buletin, jurnal, hingga buku kajian. Selain menerbitkan produk kajian, Pusat Kajian Anggaran juga memiliki fungsi untuk memberikan dukungan keahlian dalam rapat anggaran yang dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dalam hal ini adalah Badan Anggaran (Banggar).

Guna meningkatkan efektifitas dukungan dalam setiap rapat yang dilakukan oleh Badan Anggaran yang terkait dengan laporan semester APBN, maka diperlukan konsep analisis ringkas cepat mengenai berbagai isu yang dibahas didalam rapat tersebut. Agar pimpinan dan anggota badan anggaran bisa segera mengetahui hasil analisis setiap permasalahan yang telah dibahas di dalam rapat. Analisis ringkas cepat yang disajikan tidak hanya bersifat deskripsi, tetapi akan dilampirkan pula infografis terkait isu permasalahan yang dibahas.

Menurut Ancok et.al, 2014 (Dalam Modul Pelayanan Publik: 64), faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun budaya pelayanan, adalah pemahaman tentang pelayanan prima. Budaya pelayanan prima inilah yang harus menjadi dasar ASN dalam penyediaan pelayanan. Pelayanan Prima adalah memberikan pelayanan sesuai atau melebihi harapan pengguna layanan. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam memberikan pelayanan prima terdapat beberapa tingkatan yaitu: (1). Memenuhi kebutuhan dasar pengguna, (2). Memenuhi harapan pengguna dan (3). Melebihi harapan pengguna jasa, mengerjakan apa yang lebih dari yang diharapkan. (Pelayanan Publik).

B. Pemilihan Isu Prioritas

Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Belum Adanya Database Terkait Isu Pembahasan di Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	4	3	4	11
2	Belum Optimalnya Kajian Tentang Isu Pembahasan Siklus Laporan Semester APBN	5	5	4	14
3	Belum Tersedianya Perlengkapan P3K Di Ruang Kerja.	2	4	3	9

Berdasarkan Analisis USG di atas, maka isu yang dipilih adalah :

Isu ke-2 dengan rumusan isu : **Belum Optimalnya Kajian Tentang Isu Pembahasan Siklus Laporan Semester APBN**

Gagasan :

- o Membuat Analisis Ringkas Cepat Yang Komprehensif Terkait Siklus Laporan Semester APBN.;
- o Membuat Infografis Terkait Isu Yang dibahas Dalam Rapat Badan Anggaran di Siklus Laporan Semester.;
- o Membuat Inventarisir dan Data Base Terkait Isu Pembahasan Siklus Laporan Semester APBN.

C. Pemilihan Gagasan Prioritas

Matrik Pemilihan Gagasan Prioritas dengan Analisis USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Membuat Analisis Ringkas Cepat Yang Komprehensif Terkait Siklus Laporan Semester APBN.	5	5	4	14
2	Membuat Infografis Terkait Isu Yang dibahas Dalam Rapat Badan Anggaran di Siklus Laporan Semester	3	3	4	10
3	Membuat Inventarisir dan Data Base Terkait Isu Pembahasan Siklus Laporan Semester APBN	4	4	5	13

Berdasarkan Analisis USG di atas, maka gagasan yang dipilih adalah :

Gagasan ke-1 terkait pembuatan Analisis Ringkas Cepat (ARC) yang komprehensif terkait siklus Laporan Semester APBN dengan rumusan gagasan: **“Optimalisasi Analisis Ringkas Cepat Yang Komprehensif Terkait Siklus Laporan Semester APBN dan Data Base Rencana Kerja Pemerintah”**.

D. Matriks Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja	: Pusat Kajian Anggaran
Identifikasi Isu	: 1. Belum Adanya Database Mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2. Belum Optimalnya Konsep Kajian Tentang Isu Pembahasan Siklus Laporan Semester APBN* 3. Belum Tersedianya Perlengkapan P3K Di Ruang Kerja.
Isu yang Diangkat	: Belum Optimalnya Konsep Kajian Tentang Isu Pembahasan Siklus Laporan Semester APBN
Gagasan Pemecahan Isu	: 1. Membuat Analisis Ringkas Cepat Yang Komprehensif Terkait Siklus Laporan Semester APBN. 2. Membuat Infografis Terkait Isu Yang dibahas Dalam Rapat Badan Anggaran di Siklus Laporan Semester. 3. Membuat Inventarisir dan Data Base Terkait Isu Pembahasan Siklus Laporan Semester APBN.

Gagasan terpilih adalah **membuat analisis ringkas cepat yang komprehensif terkait siklus laporan semester APBN dan data base rencana kerja pemerintah.**

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Konsultasi dengan pimpinan terkait kegiatan aktualisasi.	1. Menetapkan tanggal konsultasi; 2. Koordinasi dengan sekretaris pimpinan; 3. Konsultasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi.	1. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan;	Komunikasi dengan pimpinan untuk menetapkan jadwal konsultasi dengan memperhatikan etika kesopanan (Etika Publik) Koordinasi dan kerjasama dengan pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi (WoG)	Selalu berusaha memperbaiki diri dan kemauan untuk melakukan perubahan sejalan dengan visi terwujudnya Setjen dan BK DPR RI yang professional, andal, transparan dan akuntabel	Dengan membiasakan diri memiliki perencanaan dengan konsultasi terlebih dahulu sebelum memulai tugas maka nilai religius, akuntabilitas, profesional, dan integritas pada Setjen dan BK DPR RI dapat diperkuat.
2	Mengikuti rapat siklus laporan semester APBN di Badan Anggaran	1. Konsultasi dengan mentor terkait arahan mengikuti rapat. 2. Mengajukan permohonan surat tugas mengikuti rapat siklus laporan semester APBN 3. Mengikuti rapat siklus laporan semester APBN di Badan Anggaran	1. Risalah / notulensi hasil rapat	Koordinasi dan kerjasama dengan mentor melalui interaksi yang sopan (Etika Publik) Melaksanakan perintah atasan menunjukkan sikap integritas terhadap pekerjaan (Akuntabilitas) Mengikuti rapat di Badan Anggaran dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik (Nasionalisme)	Memberikan dukungan keahlian kepada anggota dewan menunjukkan sikap professional dalam pekerjaan sejalan dengan visi terwujudnya Setjen dan BK DPR RI yang professional, andal, transparan dan akuntabel	Dengan membiasakan diri melaksanakan tugas secara professional maka nilai religius, akuntabilitas, profesional, dan integritas pada Setjen dan BK DPR RI dapat diperkuat.

3	Mengumpulkan data terkait isu yang dibahas dalam rapat siklus laporan semester APBN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor untuk melanjutkan kegiatan 2. Mencari berita – berita dan data pendukung terkait isu yang dibahas dalam rapat siklus laporan semester APBN 3. Mengelompokkan data pendukung dan berita terkait siklus laporan semester APBN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen data pendukung terkait isu dalam rapat siklus laporan semester. 	<p>Inisiatif mencari berita dan data pendukung demi menjaga mutu output yang dihasilkan (Komitmen Mutu)</p> <p>Mengumpulkan data yang reliabel guna menghasilkan hasil analisa yang baik (Komitmen Mutu)</p> <p>Mengorganisir dan memilah data dengan rapi (WoG)</p>	Mengumpulkan dan memilih data secara teliti sejalan dengan visi terwujudnya Setjen dan BK DPR RI yang professional, andal, transparan dan akuntabel	Dengan membiasakan diri memiliki data yang akurat dan valid maka nilai religius, akuntabilitas, profesional, dan integritas pada Setjen dan BK DPR RI dapat diperkuat.
4	Melakukan analisa terkait perkembangan isu siklus laporan semester APBN dan rekomendasinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor untuk arahan menganalisis data 2. Melakukan analisa dengan menambahkan data pendukung dari sumber lain 3. Mencetak hasil analisa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft awal analisis ringkas cepat yang sudah diperbaiki; 2. <i>Draft</i> awal Infografis terkait ARC 	<p>Konsultasi dan kerjasama dengan mentor melalui interaksi yang sopan (Etika Publik)</p> <p>Pengolahan data berdasarkan acuan yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan (Akuntabilitas dan Komitmen mutu)</p> <p>Mencetak hasil analisa sebagai bentuk laporan yang bisa dipertanggungjawabkan (Anti Korupsi)</p>	Memiliki kemampuan analisa yang cermat sejalan visi terwujudnya Setjen dan BK DPR RI yang professional, andal, transparan dan akuntabel	Dengan membiasakan diri menganalisa data secara matang dan baik maka nilai religius, akuntabilitas, profesional, dan integritas pada Setjen dan BK DPR RI dapat diperkuat.

5	Membuat draft kajian analisis ringkas cepat	<p>1. Konsultasi dengan mentor untuk melanjutkan kegiatan.</p> <p>2. Membuat draft kajian analisis ringkas cepat.</p> <p>3. Melaksanakan konsultasi dengan seluruh analis APBN.</p> <p>4. Mencatat masukan – masukan terkait hasil kajian.</p> <p>5. Melakukan perbaikan hasil kajian setelah mendapatkan masukan dan saran.</p> <p>6. Menyampaikan draft kajian hasil perbaikan kepada koordinator bidang untuk diperiksa.</p>	<p>1. Dokumen catatan saran dari Analisis APBN lain terkait draft awal hasil analisis;</p> <p>2. <i>Draft Analisis Ringkas Cepat</i></p> <p>3. <i>Draft Infografis</i></p>	<p>Melakukan komunikasi dengan mentor untuk melanjutkan kegiatan dengan memperhatikan etika (Etika Publik)</p> <p>Meminta masukan terkait hasil analisa dengan seluruh analis APBN guna melakukan pengendalian mutu (Komitmen Mutu)</p> <p>Bersedia menerima segala kritik dan saran demi peningkatan mutu hasil analisa (Komitmen Mutu)</p> <p>Menyampaikan draft kajian hasil perbaikan kepada koordinator bidang untuk diperiksa untuk menjamin transparansi (Manajemen ASN)</p>	Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pekerjaan agar kualitasnya maksimal sejalan dengan visi terwujudnya Setjen dan BK DPR RI yang professional, andal, transparan dan akuntabel	Dengan membiasakan diri mengevaluasi setiap hasil pekerjaan maka nilai religius, akuntabilitas, profesional, dan integritas pada Setjen dan BK DPR RI dapat diperkuat.
---	---	---	--	---	--	--

6	Publikasi analisis ringkas cepat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor / korbid terkait draft yang telah diperiksa 2. Jika tidak ada koreksi, korbid akan memaraf draft kajian yang telah diperiksa untuk diserahkan kepada kepala pusat kajian anggaran. 3. Kepala pusat kajian anggaran akan memeriksa kembali draft kajian analisis ringkas cepat. 4. Kajian analisis ringkas cepat yang telah diparaf Kapus kemudian dicetak dan diserahkan ke bagian TU 5. Pelaksana TU menyerahkan hasil kajian ARC kepada pimpinan / anggota DPR RI dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kapus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen analisis ringkas cepat 2. Surat pengantar hasil kajian 	<p>Melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan mencerminkan sikap integritas (Akuntabilitas)</p> <p>Penyajian analisis ringkas cepat yang disajikan dengan konten yang mudah dipahami (Komitmen mutu)</p> <p>Mencetak hasil analisis sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan (Anti Korupsi dan Akuntabilitas)</p>	Menyajikan hasil analisis ringkas cepat yang matang sejalan dengan visi terwujudnya Setjen dan BK DPR RI yang professional, andal, transparan dan akuntabel	Dengan membiasakan diri menyajikan informasi secara utuh dan matang maka nilai religius, akuntabilitas, profesional, dan integritas pada Setjen dan BK DPR RI dapat diperkuat.

7	Penyusunan database terkait laporan semester APBN	<p>1. Konsultasi dengan mentor terkait penyajian database laporan semester APBN.</p> <p>2. Inventarisir isu pembahasan laporan semester APBN.</p> <p>3. Evaluasi penyajian database</p>	1. Dokumen database laporan semester APBN	<p>Melakukan koordinasi bersama mentor dengan memperhatikan etika dalam berkonsultasi (Etika Publik)</p> <p>Mengelompokan isu pembahasan laporan semester APBN dengan baik dan rapi (Komitmen Mutu)</p> <p>Evaluasi setiap hasil pekerjaan dengan menambahkan saran dan masukan merupakan sikap keterbukaan dan integrasi (WoG)</p>	Melakukan penyusunan database dengan rapi dan akuntabel sejalan dengan visi terwujudnya Setjen dan BK DPR RI yang professional, andal, transparan dan akuntabel	Dengan membiasakan diri menyajikan informasi laporan semester APBN secara utuh, maka nilai religius, akuntabilitas, profesional, dan integritas pada Setjen dan BK DPR RI dapat diperkuat.
---	---	---	---	--	---	--

E. Potensi Kendala Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan aktualisasi, terdapat beberapa hal yang diidentifikasi berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan videografis terkait produk kajian di Pusat Kajian Anggaran. Berikut hal-hal yang diidentifikasi berpotensi menjadi kendala selama proses pelaksanaan kegiatan:

1. Jadwal sidang yang kadang tidak sesuai dengan yang dijadwalkan.
2. Keterlambatan hasil analisis karena waktu pengerjaan yang relative singkat
3. Data yang disampaikan dari sekretariat badan anggaran mengalami keterlambatan.
4. Waktu yang terbatas untuk melakukan pengumpulan data dan bahan pendukung untuk membuat analisis ringkas cepat.

F. Rancangan Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI	JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Konsultasi dengan pimpinan terkait kegiatan aktualisasi.																	
2.	Mengikuti rapat siklus laporan semester APBN di Badan Anggaran																	
3.	Mengumpulkan data terkait isu yang dibahas dalam rapat siklus laporan semester APBN																	
4.	Melakukan analisa terkait perkembangan isu siklus laporan semester APBN dan rekomendasinya.																	
5.	Membuat draft kajian analisis ringkas cepat																	
6.	Publikasi analisis ringkas cepat																	
7.	Penyusunan database terkait laporan semester APBN																	

Keterangan:

■ Libur Hari Raya

■ Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

BAGIAN III

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Matriks Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja	:	Pusat Kajian Anggaran
Identifikasi Isu	:	1. Belum Adanya Database Mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2. Belum Optimalnya Konsep Kajian Tentang Isu Pembahasan Siklus Laporan Semester APBN* 3. Belum Tersedianya Perlengkapan P3K Di Ruang Kerja.
Isu yang Diangkat	:	Belum Optimalnya Konsep Kajian Tentang Isu Pembahasan Siklus Laporan Semester APBN

Gagasan terpilih adalah **membuat analisis ringkas cepat yang komprehensif terkait siklus laporan semester APBN.**

B. Matriks Pelaksanaan Aktualisasi

Kegiatan 1	Konsultasi dengan pimpinan terkait kegiatan aktualisasi.
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tanggal konsultasi; 2. Koordinasi dengan sekretaris pimpinan; 3. Konsultasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi.
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar konsultasi mentor (terlampir) 2. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan (terlampir)
Tanggal Pelaksanaan	28 Mei s/d 8 Juni 2018
Hambatan	Pada kegiatan 1 (satu) ini terdapat tahapan kegiatan yang harus bertemu langsung dengan Pimpinan / Kepala Pusat Kajian Anggaran terkait persetujuan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Penulis tidak memiliki jadwal pasti kapan pimpinan ada di ruangan untuk berkonsultasi dan menandatangani Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan.
Solusi	Penulis berkoordinasi dengan staff / sekretaris pimpinan Pusat Kajian Anggaran terkait waktu untuk konsultasi dengan atasan.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 - Pelaksanaan kegiatan konsultasi dengan pimpinan terkait kegiatan aktualisasi ini pada intinya merupakan kegiatan permohonan ijin sekaligus kegiatan konfirmasi awal terkait visibilitas pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Hal pertama yang penulis lakukan adalah berkoordinasi dengan mentor terkait rencana permohonan ijin atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi khususnya produk 'Analisi Ringkas Cepat (ARC) dan Infografis'. Pada hari Senin, 28 Mei 2018 penulis meminta contoh Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan (SKMK) kepada Staf Penyusun Bahan Kebijakan PKA untuk kemudian membuat SKMK kegiatan aktualisasi. Output yang tertera pada SKMK merupakan sesuai dengan kesepakatan pada tahap pembuatan rancangan aktualisasi (Anti korupsi). Kemudian penulis menyampaikan draft SKMK tersebut dengan sopan dan beretika kepada mentor untuk kemudian diperiksa dan di paraf (Etika Publik).</p> <p>Tahapan kegiatan 2 - Setelah maksud dan tujuan permohonan izin kegiatan melalui SKMK telah disampaikan kepada mentor, tahapan kegiatan selanjutnya adalah meminta izin kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran. Dengan memerhatikan etika dan kesopanan (Etika Publik), maka penulis menanyakan terlebih dahulu kepada Staf Penyusun Bahan Kebijakan PKA terkait kesediaan Kepala Pusat untuk penulis temui (Whole of Government).</p> <p>Tahapan kegiatan 3 - Setelah Kepala PKA bersedia untuk ditemui, maka dengan sikap hormat dan sopan (Etika Publik) penulis menyampaikan maksud dan tujuan yang tertera dalam SKMK dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga penjelasan penulis dapat diterima dengan baik (Nasionalisme). Kepala PKA pun menyetujui SKMK tersebut yang kemudian surat tersebut ditandatangani dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini (Akuntabilitas).</p>

Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Dengan adanya izin dari Kepala Pusat Kajian Anggaran atas pembuatan Analisis Ringkas Cepat (ARC) berserta infografisnya maka hal tersebut dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan serupa di masa akan datang . Dengan pembuatan ARC disertai dengan Infografis ini, penulis telah berupaya untuk memudahkan pembaca hasil analisis untuk lebih mudah memahami isi dari analisis tersebut. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka penulis telah berupaya untuk mewujudkan media komunikasi alternatif berupa Infografis sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dukungan kajian khususnya bagi Anggota DPR RI dan bagi pembaca secara umum. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan dukungan pelayanannya terkait fungsi anggaran.
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan konsultasi terkait visibilitas pelaksanaan kegiatan aktualisasi merupakan suatu upaya untuk berinovasi dalam penyajian produk. Inovasi merupakan unsur yang penting sebagai perwujudan dari komitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Hal ini akan mendorong terwujudnya Pusat Kajian Anggaran yang profesional .

Kegiatan 2	Mengikuti rapat siklus laporan semester APBN di Badan Anggaran
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor terkait arahan mengikuti rapat. 2. Mengajukan permohonan surat tugas mengikuti rapat siklus laporan semester APBN 3. Mengikuti rapat siklus laporan semester APBN di Badan Anggaran
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir) 2. Risalah / notulensi hasil rapat (terlampir)
Tanggal Pelaksanaan	17 Juli dan 23 Juli 2018
Hambatan	Dalam siklus Laporan Semester I APBN 2018 terdapat 2 kali rapat yang harus diikuti oleh penulis yaitu pada tanggal 17 Juli dan 23 Juli 2018. Namun demikian, pada tanggal 23 Juli 2018 penulis tidak bisa hadir untuk mengikuti kegiatan rapat Laporan Semester I APBN 2018 dikarenakan penulis sedang tugas dinas luar pada tanggal 23 – 25 Juli 2018 untuk mendampingi Anggota Dewan yang melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah.
Solusi	Penulis telah berkoordinasi dengan mentor terkait ketidakhadiran penulis dalam mengikuti rapat kedua Laporan Semester I APBN 2018. Solusinya mentor mengirimkan notulensi dan bahan rapat kepada penulis. Notulensi dan bahan rapat ini yang kemudian dijadikan penulis sebagai bahan untuk mencari isu dalam pembuatan Analisis Ringkas Cepat dan Infografis.

<p>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan</p>	<p>Tahapan kegiatan 1 – Pada tahap pertama penulis telah berkoordinasi dengan mentor terkait dengan teknis pelaksanaan mengikuti rapat pertama dalam siklus laporan semester I APBN 2018. Dalam melaksanakan koordinasi, penulis selalu berupaya menerapkan nilai Etika Publik dengan memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan koordinasi dengan mentor.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Sebelum mengikuti rapat Laporan Semester I APBN 2018 penulis meminta izin kepada mentor sehingga kegiatan mengikuti rapat di Badan Anggaran dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabilitas dan Anti Korupsi)</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Pada tahapan selanjutnya, penulis mengikuti rapat Laporan Semester I APBN di Badan Anggaran dengan hadir tepat waktu. Dari sini penulis bisa mengaplikasikan nilai – nilai Akuntabilitas dan Professional terhadap setiap kegiatan yang akan diikuti. Selama mengikuti kegiatan rapat, penulis memperhatikan dengan seksama setiap isu yang dibahas dalam rapat Laporan Semester. Sehingga analisis yang dihasilkan bisa akurat dan dapat diandalkan sebagai wujud dari nilai – nilai Komitmen Mutu.</p>
<p>Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi</p>	<p>Kegiatan mengikuti rapat siklus laporan semester APBN di Badan Anggaran dengan hadir tepat waktu dan memperhatikan dengan teliti setiap isu yang dibahas didalam rapat Lapsem APBN akan membuat ARC dan infografis yang disajikan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan isu – isu yang sedang berkembang terkait dengan APBN. Dengan tersajinya hasil analisis yang akurat serta penyajian infografis yang menarik, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian visi organisasi yakni mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel karena Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>supporting system</i> Anggota DPR RI senantiasa meningkatkan cakupan pelayanannya terkait fungsi anggaran.</p>
<p>Penguatan Nilai Organisasi</p>	<p>Kegiatan mengikuti rapat siklus laporan semester APBN di Badan Anggaran merupakan suatu upaya pengembangan kemampuan di Pusat Kajian Anggaran dimana hal ini mendukung perwujudan nilai profesionalisme organisasi. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan produk yang berkualitas dimana hal ini mendukung perwujudan nilai Akuntabel.</p>

Kegiatan 3	Mengumpulkan data terkait isu yang dibahas dalam rapat siklus laporan semester APBN
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor untuk melanjutkan kegiatan 2. Mencari berita – berita dan data pendukung terkait isu yang dibahas dalam rapat siklus laporan semester APBN 3. Mengelompokkan data pendukung dan berita terkait siklus laporan semester APBN
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir); 2. Dokumen data pendukung terkait isu dalam rapat siklus laporan semester.
Tanggal Pelaksanaan	18 Juli s/d 20 September 2018
Hambatan	Adanya keterbatasan dalam memperoleh data dari Kementerian atau Lembaga tertentu guna mendukung pembuatan Analisis Ringkas Cepat dan Infografis.
Solusi	Penulis memanfaatkan sumber – sumber informasi lain yang mendukung ketersediaan data yang dibutuhkan. Penulis menggali informasi – informasi dari website lembaga yang berfokus pada penyediaan data statistik, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, penulis juga menggali informasi data yang berasal dari portal statistik milik pemerintah luar negeri.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Pada tahapan pertama, penulis melakukan konsultasi dengan mentor terkait data – data apa yang perlu dikumpulkan untuk mendukung pembuatan analisis ringkas cepat. Dalam melaksanakan koordinasi penulis selalu berupaya menerapkan nilai Etika Publik dengan memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan koodinasi dengan mentor.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Penulis mulai mencari data – data yang dibutuhkan dalam pembuatan ARC setelah selesai mengikuti rapat di Badan Anggaran, pada masa tersebut penulis berupaya mempelajari dan memilih data – data valid yang akan digunakan (Akuntabilitas). Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan kualitas analisis dan infografis yang akan dihasilkan nantinya. hal ini menunjukkan bahwa penulis telah mengaktualisasikan nilai Komitmen Mutu.</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Data pendukung yang telah dicari dan terkumpul, kemudian dikelompokkan menjadi 1 folder sembari di catat setiap link sumber dari data – data yang ada (Whole of Government). Hal ini guna mempermudah penulis jika suatu saat penulis membutuhkan data tersebut kembali.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Mencari dan mengumpulkan data – data yang valid ini merupakan salah satu upaya dalam menyajikan setiap analisis akuntabel. Dengan sumber data yang disajikan valid dan andal maka diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dari setiap produk kajian di Pusat Kajian anggaran. Sehingga mendukung terwujudnya Pusat Kajian Anggaran yang Profesional, Andal, dan Akuntabel .
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan mencari dan mengelompokkan data pendukung yang valid terkait siklus laporan semester APBN merupakan suatu upaya peningkatan akuntabilitas dari kajian analisis yang dihasilkan pada Pusat Kajian Anggaran dimana hal ini mendukung perwujudan nilai akuntabilitas organisasi.

Kegiatan 4	Melakukan analisa terkait perkembangan isu siklus laporan semester APBN dan rekomendasinya
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor untuk arahan menganalisis data 2. Melakukan analisa dengan menambahkan data pendukung dari sumber lain 3. Mencetak hasil analisa
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir); 2. <i>Draft</i> awal analisis ringkas cepat yang sudah diperbaiki; 3. <i>Draft</i> awal Infografis terkait ARC
Tanggal Pelaksanaan	17 Juli s/d 20 September 2018
Hambatan	Tidak adanya <i>software</i> yang mendukung untuk pembuatan <i>draft</i> infografis.
Solusi	Mengunduh <i>software</i> desain grafis yang bersifat <i>free license</i> guna mendukung pembuatan infografis.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Tahapan pertama yang penulis lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor terkait melakukan analisa. Dalam konsultasi tersebut, penulis menyampaikan dengan sopan dan beretika (Etika Publik) terkait teknis konsep analisa yang akan dimasukkan dalam analisis ringkas cepat.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Setelah mendapatkan masukan dari mentor terkait konsep analisa, maka penulis melakukan tahapan selanjutnya yaitu proses analisis setiap isu yang akan dijadikan bahan pembuatan ARC. Dalam melaksanakan analisis, data disajikan secara transparan sebagai perwujudan nilai Anti Korupsi. Dalam pelaksanaannya setiap selesai membuat analisis ringkas cepat penulis berkoordinasi dengan mentor dan segera mengirimkan hasil ARC via email ke mentor untuk diperiksa kembali sebelum dilakukan presentasi masukan untuk seluruh analis APBN di Pusat Kajian Anggaran. Sehingga dengan ini penulis telah mengaktualisasikan Whole of Government (WoG).</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Agar setiap hasil analisis terdokumentasi dengan baik, setiap selesai melaksanakan analisis penulis mencetak hasil analisa sementara. Cetakan draft analisis sementara merupakan wujud pengaplikasian nilai Akuntabilitas.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Dengan melaksanakan analisa sesuai konsep dan proses yang sesuai prosedur diharapkan hasil kajian yang disajikan menjadi akuntabel dan akurat sesuai dengan perkembangan isu yang dibahas dalam Laporan Semester APBN. Dengan proses pembuatan Analisa yang akuntabel maka diharapkan dapat meningkatkan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan, memperkuat manajemen pengetahuan, dan memperkuat pengembangan profesi Analis APBN untuk mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang Professional, Andal dan Akuntabel .
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan melakukan analisa terkait perkembangan isu siklus laporan semester dengan proses dan data yang akuntabel diharapkan mampu mendukung perwujudan nilai Profesionalisme dan Akuntabilitas organisasi.

Kegiatan 5	Membuat draft kajian analisis ringkas cepat
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor untuk melanjutkan kegiatan. 2. Membuat draft kajian analisis ringkas cepat. 3. Melaksanakan konsultasi dengan seluruh analis APBN. 4. Mencatat masukan – masukan terkait hasil kajian. 5. Melakukan perbaikan hasil kajian setelah mendapatkan masukan dan saran. 6. Menyampaikan draft kajian hasil perbaikan kepada koordinator bidang untuk diperiksa.
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir); 2. Dokumen catatan saran dari Analis APBN lain terkait draft awal hasil analisis; 3. <i>Draft Analisis Ringkas Cepat</i>; 4. <i>Draft Infografis</i>.
Tanggal Pelaksanaan	1 Agustus , 21 Agustus, 24 September 2018
Hambatan	Kesulitan dalam mencetak <i>draft</i> ARC dan <i>draft</i> Infografis dikarenakan printer belum tersedia.
Solusi	Penulis mencetak surat kegiatan tersebut di tempat rental fotokopi.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Tahapan pertama yang penulis lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor terkait jadwal untuk presentasi draft Analisis Ringkas Cepat untuk meminta masukan dari Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran. Dalam konsultasi tersebut, penulis menyampaikan dengan sopan dan beretika (Etika Publik). Dari hasil konsultasi tersebut, disepakati jika presentasi <i>draft</i> ARC akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus , 21 Agustus dan 24 September 2018.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Pada tahap kegiatan ini penulis mematangkan kembali konsep <i>draft</i> Analisis Ringkas Cepat (ARC). Agar dalam proses presentasi bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. (Komitmen Mutu)</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Pada tahapan ini penulis memaparkan <i>draft</i> kajian ARC.. Pemaparan dibuka dan dimoderatori oleh Ibu Rastri Paramita, S.E., M.M selaku mentor penulis dalam pelaksanaan aktualisasi. Tahap pertama penulis memaparkan terlebih dahulu isi draft kajian yang ada di dalam ARC, selanjutnya Analis APBN yang hadir dalam presentasi tersebut memberikan saran dan masukan terkait isi dari hasil analisis. Saran yang diberikan bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi hasil analisis itu sendiri (Pelayanan Publik)</p> <p>Tahapan kegiatan 4 – Sembari mendengarkan masukan dari Analis APBN terkait draft ARC yang telah dipaparkan, penulis mencatat setiap masukan dan saran ke dalam buku catatan (<i>notebook</i>). Dengan menulis setiap masukan yang disampaikan bertujuan untuk menghindari masukan yang terlewat ketika penulis hendak memperbaiki hasil analisis.(Anti Korupsi)</p>

	<p>Tahapan kegiatan 5 – Selesai memaparkan draft analisis ringkas cepat, penulis segera memperbaiki draft analisis yang telah dikoreksi oleh Analis APBN lain. Penulis berupaya memasukkan data-data tambahan sesuai dengan rekomendasi dan saran yang disampaikan oleh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran pada saat pemaparan. Dengan demikian ketika hasil analisis menjadi lebih akurat dan akuntabel.</p> <p>Tahapan kegiatan 6 – Setelah melaksanakan perbaikan draft analisis ringkas cepat, penulis melaksanakan koordinasi dengan mentor untuk memeriksa ulang draft kajian Analisis Ringkas Cepat yang telah diperbaiki. Draft ARC yang sudah diperbaiki, dikirim ke mentor menggunakan <i>email</i>. (<i>Whole of Government</i>)</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Dengan mengadakan pemaparan draft Analisis Ringkas Cepat ke rekan-rekan Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran diharapkan hasil analisis yang nanti disajikan mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini juga sebagai media untuk berbagi pengetahuan sehingga akan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi yakni terkait manajemen pengetahuan dan kemudian akan berdampak pada terciptanya profesionalitas organisasi melalui pembangunan profesionalisme pegawainya.
Penguatan Nilai Organisasi	Dengan mengadakan kegiatan pemaparan draft hasil ARC, artinya organisasi telah melakukan suatu proses “ <i>sharing information</i> ” di dalamnya. Dengan adanya proses transfer pengetahuan yang baik dalam organisasi, akan mendorong kompetensi dan semangat inovasi tiap-tiap individu dalam organisasi sehingga akan mendorong terwujudnya organisasi yang profesional .

Kegiatan 6	Publikasi analisis ringkas cepat
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor / korbid terkait draft yang telah diperiksa 2. Penyerahan ARC dan infografis ke Badan Anggaran 3. Mengunggah ARC yang telah diperiksa dan disetujui ke website Pusat Kajian Anggaran.
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir) 2. Tanda Terima Analisis Ringkas Cepat oleh Sekretariat Badan Anggaran (terlampir) 3. Analisis Ringkas Cepat yang sudah <i>diupload</i> ke website Pusat Kajian Anggaran (<i>Screenshot</i> terlampir)
Tanggal Pelaksanaan	16 Agustus – 5 September 2018
Hambatan	Kurangnya waktu untuk bertemu langsung dengan mentor untuk koordinasi penyerahan ARC ke Badan Anggaran .
Solusi	Penulis dan mentor bersepakat untuk melaksanakan komunikasi melalui pesan singkat.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Tahapan pertama yang penulis lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor untuk konfirmasi draft ARC yang sudah diperbaiki. Dalam konsultasi tersebut, penulis menyampaikan dengan sopan dan beretika (Etika Publik)</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Setelah ARC disetujui, tahap selanjutnya adalah penyerahan ARC dan infografis ke Sekretariat Badan Anggaran. Dalam proses ini, setelah hasil kajian diterima oleh sekretariat Badan Anggaran penulis meminta surat tanda terima sebagai bukti dan perwujudan nilai – nilai Akuntabilitas. Sebelum diserahkan ke Bangar, penulis memastikan ARC dan infografis disajikan dengan optimal sebagai bentuk Komitmen Mutu dan Pelayanan Publik</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Setelah <i>draft ARC</i> diperiksa dan disetujui, penulis berkoordinasi dengan mentor agar mengunggah ARC ke dalam website Pusat Kajian Anggaran. Sehingga dengan ini penulis telah mengaktualisasikan Whole of Government (WoG) dan Akuntabilitas</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Dengan melakukan publikasi terhadap hasil kajian analisis ringkas cepat, hal tersebut dapat meningkatkan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan. Dengan pegawai yang akuntabel terhadap pekerjaannya turut mendukung bagi terwujudnya Pusat Kajian Anggaran yang Akuntabel .
Penguatan Nilai Organisasi	Dengan melakukan publikasi terhadap hasil analisis ringkas cepat yang telah dilakukan, hal tersebut dapat menunjukkan komitmen untuk menegakkan nilai akuntabilitas dan dapat berkontribusi dalam mewujudkan organisasi yang akuntabel .

Kegiatan 7	Penyusunan database terkait laporan semester APBN
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan mentor terkait penyajian database laporan semester APBN. 2. Inventarisir Rencana Kerja Pemerintah 2008-2018. 3. Evaluasi penyajian database
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir) 2. <i>File</i> database Rencana Kerja Pemerintah (terlampir)
Tanggal Pelaksanaan	16 Agustus – 30 September 2018
Hambatan	Adanya keterbatasan untuk memperoleh data Rencana Kerja Pemerintah yang bersumber dari Kementerian / Lembaga secara langsung.
Solusi	Penulis mencari data menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta data yang bersumber dari Kementerian PPN /Bappenas.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p>Tahapan kegiatan 1 – Pada tahapan kegiatan pertama ini penulis berkoordinasi terlebih dahulu dengan mentor terkait dokumen database apa yang akan disajikan terkait Laporan Semester APBN. Penulis memilih waktu yang tepat untuk berkonsultasi dengan mentor yang merupakan wujud dari Etika Publik. Mentor dan penulis sepakat untuk menyajikan database terkait Rencana Kerja Pemerintah dalam 10 tahun terakhir (Tahun 2008 – 2018). Penyajian RKP selama 10 tahun bertujuan untuk menunjang penguatan data analisis. Hal ini merupakan bentuk perwujudan Komitmen Mutu.</p> <p>Tahapan kegiatan 2 – Selanjutnya penulis mulai mencari data – data Rencana Kerja Pemerintah dimulai dari tahun 2008 hingga tahun 2018. Selanjutnya data data yang terkumpul kemudian dikelompokkan menjadi satu folder. Hal ini sebagai perwujudan nilai Akuntabilitas.</p> <p>Tahapan kegiatan 3 – Setelah data terkumpul penulis berkoordinasi kembali dengan mentor terkait konsep penyajian database. Pada saat berkomunikasi, penulis mengedepankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bentuk perwujudan nilai – nilai Nasionalisme. Mentor merekomendasikan untuk disajikan kedalam format Microsoft Excel agar lebih mudah dan efisien. Whole of Government (WoG)</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Dengan membuat database Rencana Kerja Pemerintah akan membantu memudahkan analisis APBN khususnya untuk menunjang pembuatan analisis, hal tersebut dapat meningkatkan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan. Dengan pegawai yang akuntabel terhadap pekerjaannya turut mendukung bagi terwujudnya Pusat Kajian Anggaran yang Andal dan Akuntabel .
Penguatan Nilai Organisasi	Dengan pembuatan database rencana kerja pemerintah, hal tersebut dapat menunjukkan komitmen untuk menegakkan nilai akuntabilitas dan dapat berkontribusi dalam mewujudkan organisasi yang akuntabel .

C. Realisasi Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

No.	Kegiatan/tahapan kegiatan	Mei	Juni				Juli				Agustus				September				
		W5	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4
1	Konsultasi dengan pimpinan terkait kegiatan aktualisasi.																		
1.1	Menetapkan tanggal konsultasi																		
1.2	Koordinasi dengan sekretaris pimpinan																		
1.3	Konsultasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi																		
2	Mengikuti rapat siklus laporan semester APBN di Badan Anggaran																		
2.1	Konsultasi dengan mentor terkait arahan mengikuti rapat.																		
2.2	Mengajukan permohonan surat tugas mengikuti rapat siklus laporan semester APBN																		
2.3	Mengikuti rapat siklus laporan semester APBN di Badan Anggaran																		
3	Mengumpulkan data terkait isu yang dibahas dalam rapat siklus laporan semester APBN																		
3.1	Konsultasi dengan mentor untuk melanjutkan kegiatan																		
3.2	Mencari berita – berita dan data pendukung terkait isu yang dibahas dalam rapat siklus laporan semester APBN																		
3.3	Mengelompokkan data pendukung dan berita terkait siklus laporan semester APBN																		
4	Melakukan analisa terkait perkembangan isu siklus laporan semester APBN dan rekomendasinya																		
4.1	Konsultasi dengan mentor untuk arahan menganalisis data																		
4.2	Melakukan analisa dengan menambahkan data pendukung dari sumber lain																		
4.3	Mencetak hasil Analisa																		
5	Membuat draft kajian analisis ringkas cepat																		
5.1	Konsultasi dengan mentor untuk melanjutkan kegiatan																		
5.2	Membuat draft kajian analisis ringkas cepat																		
5.3	Melaksanakan konsultasi dengan seluruh analis APBN																		
5.4	Mencatat masukan – masukan terkait hasil kajian																		
5.5	Melakukan perbaikan hasil kajian setelah mendapatkan masukan dan saran.																		
5.6	Menyampaikan draft kajian hasil perbaikan kepada koordinator bidang untuk diperiksa.																		
6	Publikasi analisis ringkas cepat																		
6.1	Konsultasi dengan mentor / korbid terkait draft yang telah diperiksa																		
6.2	Jika tidak ada koreksi, korbid akan memaraf draft kajian yang telah diperiksa untuk diserahkan kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran.																		
6.3	Kepala pusat kajian anggaran akan memeriksa kembali draft kajian analisis ringkas cepat.																		
6.4	Kajian analisis ringkas cepat yang telah diparaf Kapus kemudian dicetak dan diserahkan ke bagian TU																		
6.5	Pelaksana TU menyerahkan hasil kajian ARC kepada pimpinan / anggota DPR RI dengansurat pengantar yang ditandatangani oleh Kapus																		
7	Penyusunan database terkait Rencana Kerja Pemerintah																		
7.1	Konsultasi dengan mentor terkait penyajian database Rencana Kerja Pemerintah.																		
7.2	Inventarisir Rencana Kerja Pemerintah																		
7.3	Evaluasi penyajian database																		

Pelaksanaan Aktual

Libur Lebaran



Pelaksanaan Aktual



Libur Lebaran

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tiga kegiatan yang mengalami perubahan dari jadwal yang tertera pada rancangan awal, kegiatan tersebut adalah:

1. Mengikuti rapat siklus laporan semester APBN di Badan Anggaran.

Dalam rancangan aktualisasi yakni untuk tahapan kegiatan nomor 2.2 terkait dengan jadwal mengikuti rapat Laporan Semester I APBN 2018 di Badan Anggaran yang pada awalnya direncanakan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan juli 2018, namun realisasi tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat yaitu tanggal 17 dan 23 Juli 2018. Untuk rapat ke-2 Laporan Semester APBN I 2018, penulis berhalangan hadir mengikuti rapat dikarenakan sedang melaksanakan tugas dinas luar dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada Anggota BAKN yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 23 – 25 juli 2018.

2. Membuat draft kajian analisis ringkas cepat.

Dikarenakan jadwal rapat yang bergeser dari jadwal yang diperkirakan, kegiatan pembuatan draft kajian analisis ringkas cepat juga mengalami pergeseran jadwal. Namun demikian hingga waktu aktualisasi selesai, semua kegiatan dan target output telah terselesaikan dengan baik.

3. Publikasi analisis ringkas cepat.

Jadwal untuk tahapan publikasi analisis ringkas cepat disesuaikan dengan waktu penyelesaian draft analisis ringkas cepat. Dikarenakan waktu pembuatan draft analisis ringkas cepat yang bergeser dari jadwal yang sudah ditentukan, waktu untuk publikasi analisis ringkas cepatnya juga mengalami pergeseran jadwal.

BAGIAN IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, maka telah diaktualisasikan pula nilai-nilai dasar PNS serta pengetahuan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Tujuh kegiatan yang telah diaktualisasikan di tempat kerja selama rentang waktu 23 Mei sampai dengan 30 September 2018 yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran, mentor, dan Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran, kegiatan aktualisasi dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah etika publik, akuntabilitas, anti korupsi, komitmen mutu dan *Whole of Government*.
2. Mengikuti rapat Laporan Semester I APBN 2018 di Badan Anggaran dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah etika publik, nasionalisme, akuntabilitas, dan komitmen mutu.
3. Mengumpulkan data terkait isu yang dibahas dalam rapat siklus laporan semester APBN dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi dan *Whole of Government (WoG)*.
4. Melakukan analisa terkait perkembangan isu siklus laporan semester APBN dan rekomendasinya dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah akuntabilitas, anti korupsi, komitmen mutu dan *Whole of Government (WoG)*.
5. Membuat draft kajian analisis ringkas cepat dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah etika publik, akuntabilitas, *Whole of Government (WoG)*, anti korupsi dan pelayanan publik.
6. Publikasi analisis ringkas cepat dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah etika publik, akuntabilitas, *Whole of Government (WoG)*, komitmen mutu, dan pelayanan publik.
7. Penyusunan database terkait laporan semester APBN dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasika pelayanan publik, komitmen mutu, akuntabilitas dan etika publik.

Pembelajaran yang didapat dari kegiatan aktualisasi dengan mengaktualisasikan nilai-niai dasar PNS serta mengetahui peran dan kedudukan PNS dalam NKRI adalah mewujudkan nilai nilai akuntabilitas dalam melaksanakan pekerjaan, mengedepankan semangat nasionalisme diatas kepentingan pribadi maupun golongan, menerapkan standar etika publik dalam perilaku kerja dan keseharian, senantiasa berkomitmen dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugas jabatan, dan tidak melakukan praktik korupsi di lingkungan kerja.

Jika dalam melaksanakan ketujuh kegiatan di atas tanpa didasari nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan PNS dalam NKRI maka hasil pekerjaan akan kurang optimal sehingga menyebabkan tujuan organisasi juga tidak tercapai secara optimal.

B. Saran

Selama proses pembelajaran klasikal maupun non klasikal dalam rangkaian pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar) CPNS DPR RI termasuk pelaksanaan program aktualisasi ini, maka terdapat beberapa saran dimana penulis berharap melalui kegiatan dan laporan aktualisasi ini bisa menjadi salah satu gagasan yang dapat dikembangkan dan berkelanjutan sehingga tidak hanya terhenti sebagai gagasan prasyarat dalam program diklatsar CPNS. Penyediaan Analisis Ringkas Cepat beserta infografis dalam siklus Laporan Semester APBN 2018 diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung akuntabilitas dan profesionalisme dari organisasi. Dan harapan utamanya agar hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi organisasi.

C. Rencana Tindak Lanjut

Agar kegiatan aktualisasi ini bisa menjadi salah satu gagasan yang dapat dikembangkan dan berkelanjutan serta tidak hanya terhenti sebagai gagasan prasyarat dalam program diklatsar CPNS maka penulis akan berupaya:

1. Menyempurnakan konsep analisis ringkas cepat.
2. Menyempurnakan infografis dan penyajian data base RKP.
3. Menyempurnakan konsep data base yang sudah ada dan di unggah ke cloud hosting.

LAMPIRAN KEGIATAN 1

*Konsultasi dengan pimpinan terkait kegiatan
aktualisasi*



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : www.dpr.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN
NOMOR: BK/09866 /SETJEN DPR RI/PA/ 05/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Slamet Dhul Fadli, S.E.
NIP : 199405272018011003
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran DPR RI

Adalah benar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI yang melaksanakan kegiatan aktualisasi mulai tanggal 28 Mei 2018 – 30 September 2018. Adapun kegiatan aktualisasi yang dilakukan adalah melakukan pembuatan Analisis Ringkas Cepat yang Komprehensif terkait Siklus Laporan Semester APBN dengan output maksimal 10 dokumen Analisis Ringkas Cepat.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 28 Mei 2018

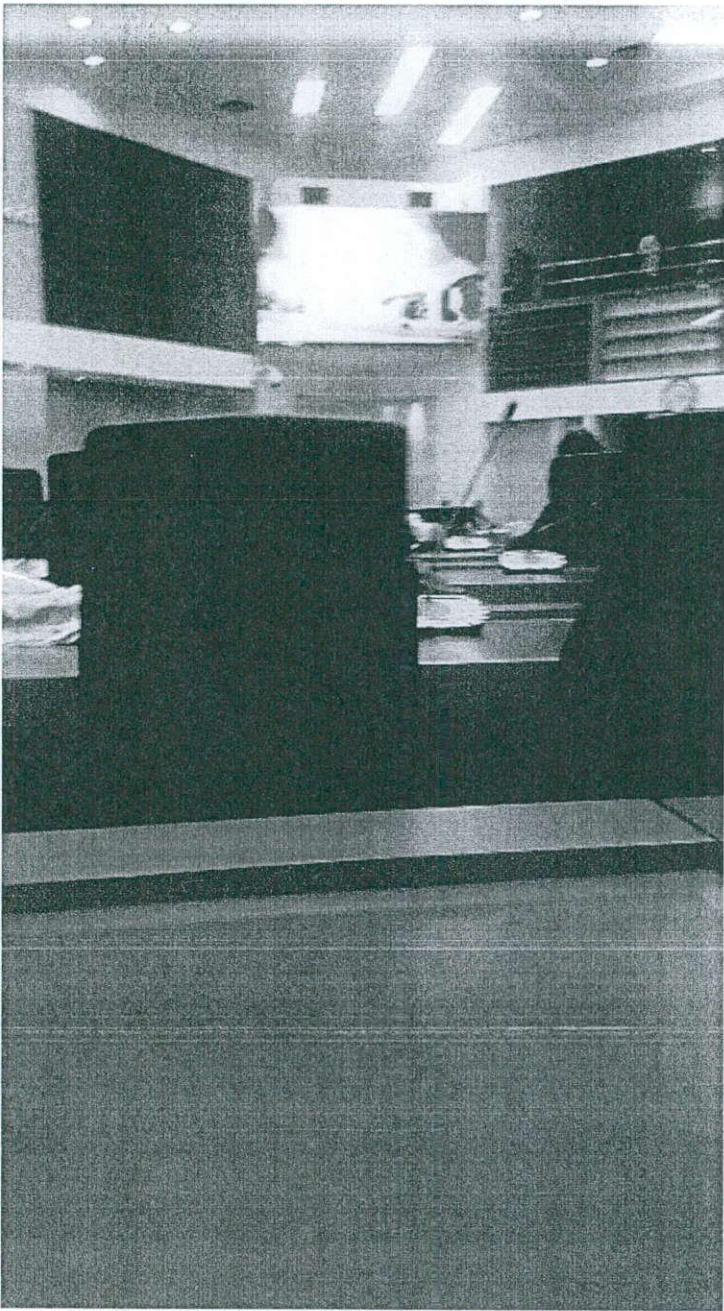
Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si
NIP. 19710911 199703 1 005

LAMPIRAN KEGIATAN 2

*Mengikuti rapat siklus laporan semester
APBN di Badan Anggaran*

Dokumentasi Kegiatan 2 : Rapat di Badan Anggaran



**RAPAT KERJA PENYAMPAIAN KETERANGAN PEMERINTAH ATAS REALISASI DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN TA. 2017 DAN PROGNOSIS TA. 2018 BERSAMA MENTERI
KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK INDONESIA
Selasa, 17 Juli 2018, Pukul 13.00 s.d. 16.00 WIB**

Isu-isu yang Disampaikan Anggota Banggar dalam Rapat Kerja:

1. **Parameter Kemiskinan.** Meminta penjelasan Menteri Keuangan terkait parameter kemiskinan karena melihat di sosial media bahwa pendapatan dalam rangka menilai kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
2. **Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.** Dana yang digelontorkan besar namun tidak signifikan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada sesuatu yang tidak wajar dari kinerja pemerintah bidang ekonomi. Pemerintah semestinya melakukan skala prioritas atas terhadap infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Dimana infrastruktur telah naik sejak tahun 2012 hingga tahun 2018, dengan anggaran yang naik dari Rp150 Triliun^{*)} menjadi Rp440 triliun^{*)}. Contoh tidak signifikannya infrastruktur terhadap pertumbuhan, diantaranya:
 - a. **Semen dan Baja Lokal.** Infrastruktur dibangun dengan anggaran besar namun penggunaan semen dan baja lokal masih sangat kecil.
 - b. **Subkontraktor.** Telah terjadi kebangkrutan yang luar biasa terhadap subkontraktor-subkontraktor. Dari 80 ribu subkontraktor, 37 ribu diantaranya telah bangkrut dan sisanya tinggal 43 ribu yang merupakan aset bangsa.
 - c. **Tol Laut.** Tol laut perlu di kaji kembali, karena tol laut tidak berdampak kepada masyarakat disebabkan tidak dipantau oleh pemerintah. Harga barang di daerah yang dilewati tol laut tetap mahal karena mengikuti mekanisme pasar. Selain itu, harga barang yang melalui tol laut lebih mahal dibandingkan yang tidak melalui tol laut.
 - d. **Bandara Kertajati.** Saat ini baru ada satu maskapai penerbangan BUMN (Citilink) itu pun dengan penugasan. Akses ke bandara dirasa cukup sulit terkait jarak tempuh.
 - e. **Jembatan dari Batulicin ke Pulau Laut.** Pemerintah membangun jembatan terpanjang di Indonesia yaitu dari Batu Licin ke Pulau Laut, dimana Pulau Laut itu terdiri dari 60% kawasan hutan lindung yang tidak dapat dilakukan pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Jembatan ini tidak ada di dalam Program Strategis Nasional (PSN).
 - f. **Waduk Pasir Loreng.** Ketidaktepatannya pembangunan waduk berbiaya Rp2,1 Triliun^{*)} yang diharapkan untuk dapat mengatasi banjir di Kabupaten Wajo. Karena seharusnya pemerintah cukup dengan menangani pendangkalan di Danau Tempe.
 - g. **Pembangunan Bandara Balikpapan, Bandara Samarinda, dan tol Balikpapan-Samarinda.** Pemerintah sebelumnya telah membangun Bandara di Balikpapan dengan dana Rp2 Triliun dengan kapasitas 15 juta penumpang, kemudian hendak dibangun tol dari Samarinda ke Balikpapan sebagai akses ke Bandara, akan tetapi kemudian juga dibangun Bandara di Samarinda, menyebabkan bandaranya mati dan jalan tol menjadi tidak laku.
3. **Pengendalian Impor.** Hentikan impor yang sudah *captive*, seperti impor beras, gula, dll. Pemerintah harus dapat memaksa BUMN menggunakan dana PMN yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dana PNM tahun 2015 di BUMN masih banyak yang belum digunakan. Padahal harapannya dengan adanya PNM dapat *meleverage* kinerja BUMN dalam menjalankan fungsinya

4. **Tax Amnesty.** Jika hasil *tax amnesty* yang berada di luar negeri dapat ditarik ke dalam negeri pada tahun 2018, maka kinerja keuangan pemerintah akan lebih baik lagi.
5. **Cadangan Devisa.** Apakah benar stabilisasi pasar telah mencapai USD 3 Miliar, jika memang demikian cadangan devisa bisa habis. Perlu mempertimbangkan kondisi cadangan devisa dalam penggunaannya untuk menstabilkan nilai tukar. BI harus kerja keras dalam menciptakan kondisi nilai tukar melalui perbaikan ekonomi sehingga tidak terlalu membebankan cadangan devisa.
6. **Target Pertumbuhan Ekonomi BI.** *Range* pertumbuhan ekonomi yang ada di *outlook* sebaiknya tidak terlalu besar dan akurat seperti yang dilakukan oleh institusi luar negeri.
7. **Apresiasi Kinerja Pemerintah,** Mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk LKPP 2017.
8. **Tata Kelola Fiskal.** Capaian pembangunan dalam 3 tahun yang ditunjukkan oleh angka acuan *gini ratio* pada awal pemerintahan di tahun 2015 berada pada 0,4 sekarang dapat diperkecil menjadi 0,389. hal ini perlu didukung dalam rangka memperkecil disparitas dan menunjukan tatakelola fiskal telah berada di jalur yang tepat.
9. **Disiplin Fiskal dan Pembelanjaan.** Dinilai tepat sasaran, dimana tingkat kemiskinan dari 11,13 persen^{*)} di tahun 2015 menjadi *single digit* 9,82 persen^{*)} di semester I tahun 2018.
 - a. **Penerimaan Negara.** Target penerimaan negara sebesar Rp8,3 Triliun^{*)} di akhir tahun 2018 agar dapat dijaga dengan baik dan defisit dikisaran 2,12 persen dapat dijaga.
 - b. **Primary Balance.** *Primary balance* terus-menerus mengecil namun kapankah keseimbangan primer kita menjadi positif.
8. **Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.** Perlu dievaluasi apa yang menyebabkan penyerapan DAK menjadi tidak optimal.
 - a. **Evaluasi penurunan penyerapan DAK Fisik dengan APBD.** Dilakukan pencermatan apakah rendahnya penyerapan DAK Fisik juga terjadi pada rendahnya penyerapan APBD khususnya terhadap program-program pembangunan. Perlunya dilakukan koordinasi dengan Kementerian terkait agar serapan yang rendah dapat ditingkatkan.
 - b. **Evaluasi Skema DAK.** Seharusnya dilakukan evaluasi skema DAK mulai dari skema pengusulan hingga penetapan anggaran DAK Fisik. Serapan DAK Fisik tidak maksimal disebabkan pengusulan pagu anggaran yang ditetapkan dilakukan pada saat APBD telah berproses.
 - c. **Kendala Pelaporan SPJ.** Penyerapan DAK *in-line* dengan dokumen Surat Pertanggungjawaban yang dibuat menghabiskan waktu, banyak *form* dan aplikasi yang harus dikerjakan.
 - d. **Tahapan Pencairan Dana.** Saat ini terdapat empat tahapan penyaluran dana yang jaraknya berdekatan satu dengan yang lain, diusulkan agar dibagi dalam dua termin saja.
 - e. **Juknis dan Juklak.** Mengusulkan agar Juknis dan Juklak tidak telat diberikan ke daerah serta dibuat dengan memperhatikan kebutuhan di daerah.
 - f. **DAK Satu Pintu.** Mekanisme pengusulan DAK agar dibuat satu pintu supaya ada efisiensi kinerja pemerintahan.

^{*)} Rekaman Rapat Kerja Badan Anggaran bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia Tanggal 17 Juli 2018.

LAPORAN
RAPAT PANJA BANGGAR MEMBAHAS KESIMPULAN LAPORAN REALISASI SEMESTER I DAN
PROGNOSIS SEMESTER II APBN TA 2018 BERSAMA KEMENTERIAN KEUANGAN
Rabu, 23 Juli 2018, Pukul 12.00 s.d. 14.00WIB

Isu-isu dalam rapat pembahasan kesimpulan laporan realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2018, diantaranya:

1. **Rekomendasi Dalam Laporan Panja.** Forum rapat bertanya mengapa rekomendasi tidak dicantumkan dalam kesimpulan laporan ini atau cukup disimpulkan saja karena ini hanya melaporkan yang sudah berjalan.
2. **Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok.** Forum rapat bertanya mengenai strategi pemerintah dalam menghadapi dampak dari perang dagang ini.
3. **Pengendalian Nilai Tukar.** Bank Indonesia harus punya *timing* kebijakan yang tepat, cermat, dan cepat. BI tidak bisa selalu ada dalam pasar. BI harus memastikan jangan sampai kecepatan pelemahan Rupiah melebihi kecepatan intervensi BI. Nilai tukar yang naik akan memengaruhi harga kebutuhan rumah tangga juga ikut naik atau mahal. Lonjakan harga ini diharapkan tidak terjadi di semester II tahun 2018.
4. **Strategi Pemerintah Di Semester II.** Bagaimana strategi pemerintah di semester II tahun 2018 agar APBN yang dianggarkan bisa berjalan dan terealisasi dengan baik.
5. **Target PNBPN Berupa Dividen BUMN.** Diharapkan terjadi *leverage* atas PBNP BUMN mengingat telah digelontorkannya PMN yang demikian besar sejak 2013 s.d. 2016. Target PNBPN BUMN diharapkan tidak hanya 13 persen tetapi bisa lebih dari itu dan jika bisa hingga 100 persen, apalagi BUMN telah diberi prioritas untuk membangun infrastruktur dengan adanya anggaran infrastruktur yang telah naik dari Rp150 triliun menjadi Rp440 triliun*) dan yang telah menyebabkan matinya usaha 26 ribu subkontraktor dalam 2-3 tahun belakangan ini.
6. **Pertumbuhan Ekonomi.** Pertumbuhan ekonomi berada 5,01 persen yang berarti jauh dari target 5,4 persen s.d. 6,1 persen pada semester I tahun 2018. Namun, di prognosis semester II tahun 2018 mengapa hanya ditargetkan sebesar 5,3 persen sehingga pertumbuhan ekonomi rata-rata nantinya sebesar 5,2 persen. Pemerintah harus optimis untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi di semester II 2018. Kejarlah target terlebih dulu, apabila setelah dikejar ternyata tidak tercapai itu tidak menjadi persoalan. Target pertumbuhan ekonomi 5,8 persen semestinya bisa tercapai jika 16 paket kebijakan itu betul-betul dievaluasi dan semuanya berjalan maksimal.
7. **Dana Desa dan Dukungan Terhadap Swasembada Pangan.** Swasembada tidak terjadi karena dana desa belum dievaluasi, apakah dana desa itu bisa memberikan swasembada pangan dengan benar. Desa jangan dibuat menjadi kota, namun tetap menjadi desa

dengan harapan target pendapatan orang desa meningkat seperti di Tiongkok, dimana pendapatan petani bisa naik hingga 10 kali lipat. Dengan dana desa diharapkan mampu berkontribusi dalam swasembada pangan, sehingga tidak perlu lagi melakukan impor beras, kedelai, dll.

8. **Peningkatan Cukai Rokok.** Informasi dari Bea dan Cukai, bahwa tarif cukai rokok akan dinaikan, apakah ini masuk dalam prognosis 2018 semester II? Harus berhati-hati dalam menaikkan cukai rokok karena rokok saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Khawatirnya, ketika cukai rokok naik, masyarakat akan mengorbankan kebutuhan pokok yang lain. Jika ini dinaikkan maka kebutuhan pokok masyarakat bisa tergerus. Ini bersifat kontraproduktif, jadi mohon agar dicari sumber penerimaan lainnya selain cukai rokok karena bisa mematikan usaha jutaan pedagang rokok dan pelinting rokok. Ini akan membuat ekonomi tergerus padahal pendapatan kedua terbesar APBN adalah dari cukai rokok^{*)}.
9. **Impor Peralatan dan Obat-Obatan Untuk Keperluan *ASIAN Games*.** Terdapat peralatan dan obat-obatan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri yang mendukung pelaksanaan *ASIAN Games* perlu diberi kemudahan dalam melakukan impor. Mohon dalam hal ini Kementerian Keuangan bisa membantu mengeluarkan peraturan khusus untuk membantu cabang-cabang olahraga sehingga bisa mempermudah atlet nasional untuk bisa lebih berprestasi.

^{*)} Rekaman Rapat Panja Badan Anggaran bersama Kementerian Keuangan Tanggal 23 Juli 2018.

LAMPIRAN KEGIATAN 3

*Mengumpulkan data terkait isu yang dibahas dalam
rapat siklus laporan semester APBN*

Daftar Sumber Data Pendukung Analisis Ringkas Cepat

Dalam rangka mendukung pembuatan Analisis Ringkas Cepat, penulis menambahkan data – data yang bersumber dari:

No	Nama Sumber	Data Sumber
1.	Kementerian Keuangan	RUU APBN, Nota Keuangan, APBN
2.	Badan Pusat Statistik	1. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Juli 2018 2. Laporan Perekonomian Indonesia 2018
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
4.	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Data penggunaan dana desa tahun 2015 s/d tahun 2017
5.	Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia	Data Komparatif BUMN Holding Indonesia, Singapura dan Malaysia
6.	The Census Bureau of United States	Data Ekspor dan Impor Amerika Serikat & China
7.	Institute For Development Of Economics And Finance (Indef)	Diskusi Dwi Bulanan INDEF tentang UU PMK 146/2017
8.	Jurnal Pendukung lain	

LAMPIRAN KEGIATAN 4

Melakukan analisa terkait perkembangan isu siklus laporan semester APBN dan rekomendasinya

Terhambatnya Pembangunan Infrastruktur di Daerah Akibat Belum Optimalnya Penyerapan DAK Fisik Semester I Tahun 2018

Dalam rapat kerja penyampaian keterangan pemerintah atas realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN semester I 2018 antara Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tanggal 17 Juli 2018, Pemerintah menyampaikan adanya sejumlah masalah dalam pelaksanaan realisasi APBN di semester pertama tahun 2018. Salah satu masalah yang disoroti adalah lemahnya realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) pada semester I 2018.

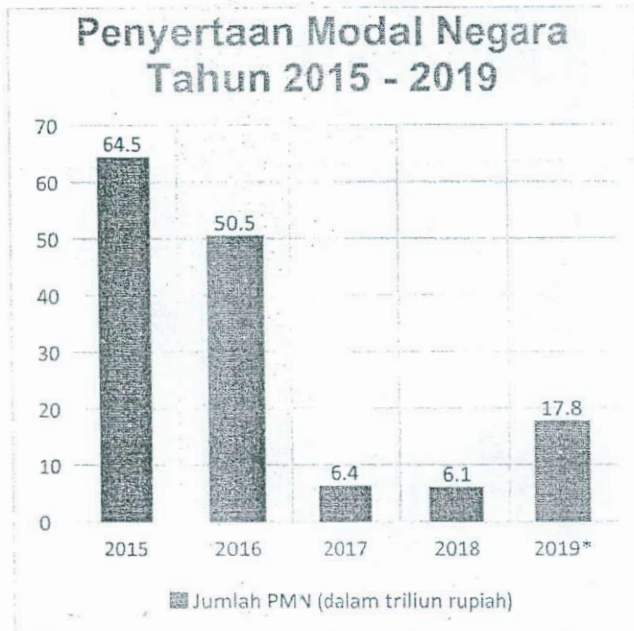
DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada tahun 2018 pemerintah mengalokasikan DAK Fisik sebesar Rp62,43 triliun dimana proses penyalurannya dibagi dalam 3 tahap. Untuk tahap I penyaluran sebesar 25% dari pagu alokasi yang pencairannya dilaksanakan antara bulan Februari – Juli 2018.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan realisasi penyerapan DAK fisik pada semester I 2018 hanya sebesar Rp7,8 triliun atau 12,4% terhadap APBN. Jumlah ini menurun drastis dibandingkan dengan realisasi semester I pada tahun 2017 yang mencapai Rp17,4 triliun atau 25,1% terhadap APBN. Berdasarkan laporan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, penyebab dari menurunnya realisasi penyerapan DAK Fisik pada semester pertama tahun 2018 akibat adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pergantian pucuk kepemimpinan di daerah berdampak pada kebijakan pembuatan kontrak proyek infrastruktur. Kurang sinkronnya perencanaan antara kementerian/lembaga dan daerah juga menjadi penyebab keterlambatan penyaluran DAK Fisik pada semester ini.

Merosotnya realisasi penyerapan DAK fisik ini harus menjadi fokus evaluasi pemerintah. Jika DAK Fisik dapat terserap dengan baik maka akan mampu mendorong program prioritas kerja pemerintah. Pertumbuhan infrastruktur dapat membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan dapat mengintegrasikan daerah satu dengan yang lainnya. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan daerah penerima DAK Fisik. Selain itu penguatan komunikasi antar lembaga terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Anggaran pada saat penyusunan anggaran akan meminimalisir terlambatnya pencairan DAK Fisik.

Menimbang Efektifitas Penyertaan Modal Negara Untuk BUMN

Tugas dan fungsi penatausahaan Penyertaan Modal oleh pemerintah merupakan konsekuensi kepemilikan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan RUU APBN 2019 pemerintah mengalokasikan 17,8 triliun untuk menyuntik modal pada 3 BUMN yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Hutama Karya, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Dalam perkembangannya, kebijakan pemerintah untuk menyertakan modalnya pada BUMN tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja BUMN. Beberapa BUMN malah merugi setelah mendapatkan suntikan dana dari negara.



Pada periode tahun 2015-2016 penyertaan modal negara untuk BUMN meningkat cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengalokasikan investasi kepada BUMN yang merupakan agen pembangunan dapat berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional (Nawacita). Namun, pada 2017 pemerintah menurunkan alokasi anggaran PMN ke BUMN sesuai arah kebijakan pembiayaan investasi untuk mendorong kemandirian BUMN. Investasi pemerintah ke BUMN pada 2017 turun 87 persen menjadi Rp 6,4 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan perusahaan pelat merah milik negara tetangga Singapura, pertumbuhan BUMN Indonesia masih cukup tertinggal. Pada periode 2012-2016, untuk holding BUMN milik pemerintah Singapura (Temasek) telah berhasil mencatat pertumbuhan aset sebesar 128,99 persen, sedangkan BUMN Indonesia hanya berhasil tumbuh 42,3 persen.

Secara umum ada 2 permasalahan inti yang harus mendapatkan perhatian untuk mengembangkan BUMN, yaitu kapasitas keuangan dan kapasitas organisasi. Dalam segi kapasitas keuangan, BUMN Indonesia masih berkutat dengan manajemen keuangan perusahaan yang tradisional melalui pembiayaan dengan cara melakukan pinjaman ke bank, menjual saham, dan mengeluarkan obligasi, serta pemanfaatan dana internal perusahaan. Dengan tata kelola keuangan seperti ini perusahaan hanya akan berfokus pada cara mengatur utang perusahaan yang diperoleh.

Padahal, pemerintah juga bisa berperan dalam membuat diversifikasi dalam membantu keuangan BUMN yaitu dengan pengelolaan dividen BUMN. Pemerintah dapat mengonversi dividen menjadi penyertaan modal negara. Sebagai contoh, dividen yang dibagikan 40% dari laba. Pemerintah hanya mengambil 20%, sisanya ditanamkan kembali dalam bentuk PMN. Sehingga kapasitas leverage keuangan perusahaan akan bertambah. Tapi pada saat ini ada kendala yang dihadapi oleh BUMN, yaitu adanya target realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari dividen BUMN yang setiap tahun targetnya terus naik. Padahal BUMN memerlukan relaksasi dari pemerintah. Dengan menurunkan target dividen yang disetorkan BUMN kepada negara.

Untuk selanjutnya akan lebih baik jika BUMN tidak terlalu mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Jika membutuhkan tambahan modal equity financing, perusahaan bisa dengan melibatkan investor swasta. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan manajer investasi agar mengajak investornya menanamkan modal pada BUMN yang menjalankan proyek infrastruktur. Sasaran dari investor ini adalah pihak yang mengelola dana jangka panjang seperti dana pensiun dan dana haji. Pengelola dana pensiun dan haji sebaiknya tidak lagi berpikir membeli bond atau deposito. Tapi mulai menginvestasikan dana yang dikelola kepada sektor riil yaitu infrastruktur.

Dari segi pemilihan BUMN yang akan diberikan penyertaan modal negara, akan lebih baik jika pemerintah memberikan suntikan modal kepada BUMN terbuka (tbk). Hak kontrol pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas menjadi bertambah kuat. Proporsi saham pemerintah bertambah, sedangkan proporsi saham publik menurun (terdilusi). BUMN terbuka juga memiliki risiko keuangan atas pengelolaan dana PMN lebih kecil jika dibandingkan dengan BUMN tertutup karena akan diawasi publik dan investor saham.

Peluang Merebut Pasar Ekspor Dalam Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok

Dalam 3 bulan terakhir rupiah mengalami tren pelemahan yang cukup signifikan, bahkan sempat menyentuh angka Rp15.000 per dollar. Salah satu penyebab dari pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini adalah karena neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit. Sentimen negatif dari pasar terhadap defisit neraca perdagangan menyebabkan IHSG dan rupiah terus merosot. Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik pada tanggal 17 September 2018, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan ke enam kalinya sepanjang tahun 2018. Artinya, nilai impor Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah ekspor. Di sisi lain, kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui penyesuaian PPh impor asal 22 juga dinilai tak akan berefek signifikan karena barang konsumsi hanya menyumbang sekitar 10% terhadap total impor dan menysasar komoditas yang tak terlalu dibutuhkan.



*Data ekspor selama Agustus 2018 (Dalam juta USD)
Sumber : BPS

Untuk mengatasi masalah defisit neraca perdagangan pemerintah bisa menambahkan jumlah ekspor dengan memanfaatkan peluang dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Perang dagang tak selalu membawa dampak negatif bagi perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Karena jika melihat data statistik ekspor, kedua negara tersebut merupakan ekspor terbesar bagi Indonesia terutama untuk sektor non migas. Selama bulan Agustus 2018, Amerika Serikat memiliki porsi ekspor sebesar \$1,59 miliar dan US\$ 2,1 miliar. Selain itu sepanjang tahun 2017 juga telah menyumbangkan porsi sebesar 10% dan 13,7% terhadap nilai ekspor Indonesia.

Potensi penurunan nilai dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok bisa dimanfaatkan Indonesia untuk masuk ke pasar masing – masing. Indonesia bisa menambahkan jumlah ekspor komoditas unggulan. Secara spesifik untuk ke pasar impor Tiongkok, Indonesia bisa menambahkan jumlah ekspornya seperti bubur kayu, ferronikel, karambol, dan produk kayu. Sedangkan untuk ke pangsa pasar Amerika, Indonesia bisa menambahkan jumlah ekspornya untuk komoditas laut seperti udang dan udang galah, minyak sawit, kepiting, pakaian wanita, serta sepatu olahraga.

Ada berbagai langkah yang harus pemerintah tempuh untuk dapat memanfaatkan peluang dagang yang lebih besar dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok. Yang pertama adalah dengan meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dan konsultasi dengan kedua negara. Setelah itu, pemerintah dapat meningkatkan promosi dagang ke negara tersebut. Agar produk yang diekspor semakin beragam pelaku usaha dapat diversifikasi produk dan mengubah orientasi produk komoditas menjadi produk olahan agar barang yang diekspor dapat semakin bernilai.

Meski begitu, untuk mengambil peluang ekspor ke masing-masing negara tidaklah mudah. Misalnya untuk ekspor ke negara Tiongkok, Indonesia masih membutuhkan banyak baku dan material sehingga pemerintah dan pelaku usaha mesti mengupayakan peningkatan industri manufaktur yang berorientasi ekspor.

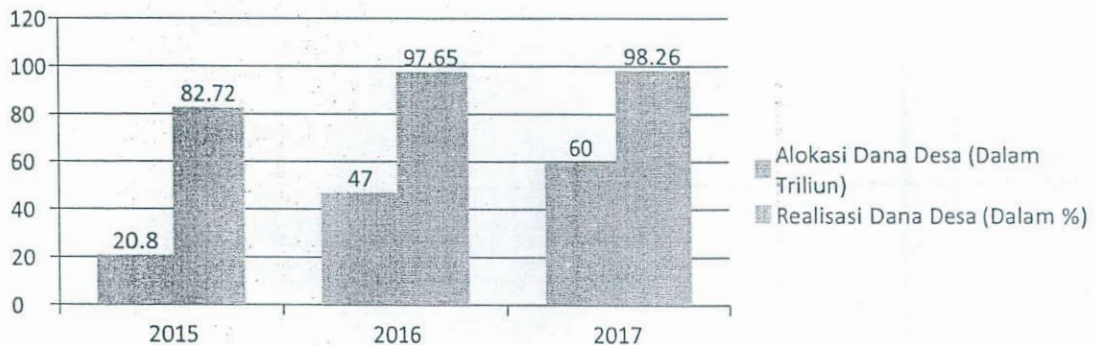
dengan bahan baku lokal. Dengan memanfaatkan material lokal dalam proses produksi untuk produk ekspor maka akan membawa dampak juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah.

Selain itu Indonesia juga masih harus bersaing dengan negara – negara eksportir lain yang ada di Asean seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand. Untuk itulah para pelaku bisnis harus di dorong untuk dapat menyediakan produk yang berkualitas guna mendapatkan pangsa pasar impor dengan porsi yang lebih besar untuk kedua negara yang sedang mengalami perang dagang.

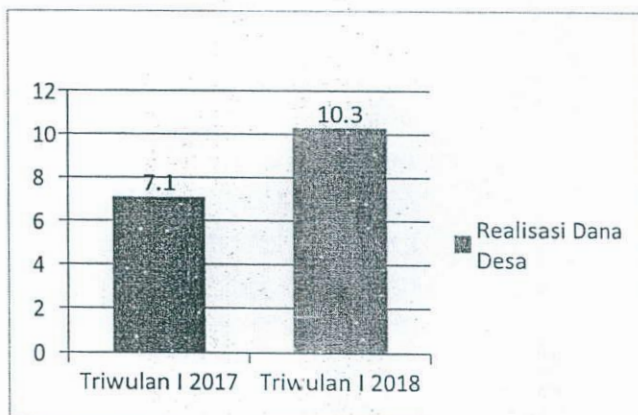
Efektifitas Dana Desa Untuk Mendorong Swasembada Pangan

Pada tahun 2018, pemerintah kembali melakukan transfer dana desa untuk seluruh provinsi di Indonesia. Penyaluran dana desa tersebut menggunakan skema padat karya tunai atau cash for work dengan jumlah pencairan sebanyak tiga tahap. Dana desa dari tahun ketahun semakin besar jumlahnya yang ditransfer oleh pemerintah pusat, bahkan di tahun 2019 dana desa akan ditambah menjadi 73 Triliun rupiah.

Alokasi dan Realisasi Dana Desa Tahun 2015 - 2017



Pengelolaan Dana Desa yang diatur dalam UU Desa kemudian dijabarkan secara lebih detail dalam Peraturan Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017 (Permendes 19 Tahun 2017) ini mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018. Dalam aturan itu ditegaskan, dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa yang bersifat lintas bidang.



Kementerian Keuangan merilis realiasi penyerapan dana desa pada triwulan I 2018 mencapai Rp 10,3 triliun atau sebesar 17,1% dari total anggaran Rp 60 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 7,1 triliun atau sekitar 15% dari alokasi. Meningkatnya realisasi penyerapan dana dipicu oleh

percepatan implementasi karya tunai (cash for work) sejak awal tahun ini.

Setiap tahun alokasi dan penyerapan dana desa tergolong tinggi, namun dalam penyaluran nya masih kurang untuk mendorong kesejahteraan petani. Karena saat ini dana desa sebagian besar dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang kurang berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan petani. Dana desa sebaiknya difokuskan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa yang rata – rata bermata pencaharian sebagai petani. Konsep mengubah desa menjadi sebuah kota dengan mendorong pembangunan infrastruktur secara besar - besaran dinilai belum tepat sasaran.

Membangun kemandirian pangan berbasis desa dilakukan dengan berbagai langkah. Misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai wadah pengelolaan dana sekaligus agen penyaluran modal usaha sektor-sektor pangan. Masyarakat bisa mendapatkan modal untuk menjalankan usaha disektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

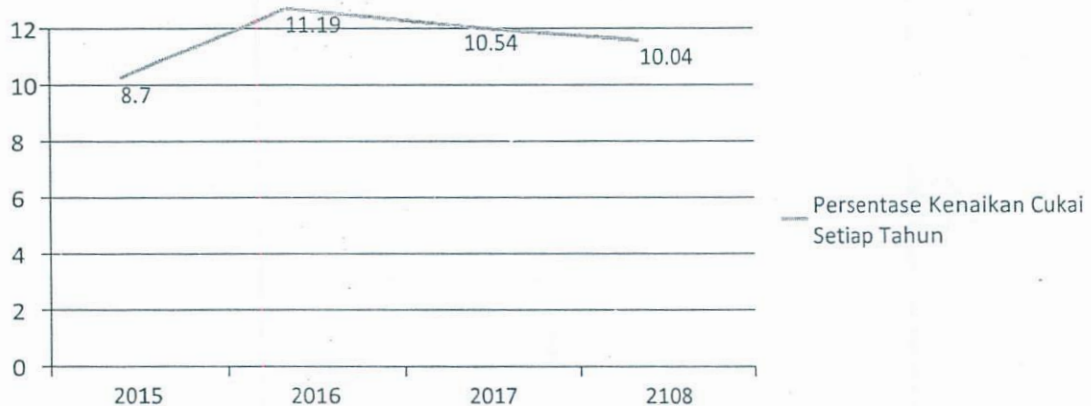
Peluang desa untuk membangun kedaulatan pangan semakin kuat seiring pengakuan dan pemberian kewenangan luas kepada desa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6/2014 tentang Desa. Dalam regulasi ini, desa diberi kewenangan mengelola dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Dengan mendorong pengelolaan dana desa agar berfokus pada swasembada pangan maka akan membantu menurunkan jumlah impor beras dari negara lain.



Prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal yang menunjang swasembada pangan antaranya melalui pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa, pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan, pengembangan benih lokal, termasuk pengembangan ternak secara kolektif.

Evaluasi Dampak Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara dan Produksi Tembakau Domestik

Terhitung tanggal 1 Januari 2018 pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10,04 persen. Pemerintah berdalih pembuatan kebijakan dalam rangka mengendalikan konsumsi rokok. Salah satunya adalah menaikkan tarif cukai hasil tembakau. Kenaikan tarif cukai yang berimplikasi pada kenaikan rokok diharapkan mampu meredam konsumsi, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Alasan ini diperkuat dengan rilis Kementerian Kesehatan, beban pemerintah akibat rokok dan tembakau lebih tinggi ketimbang besaran kontribusi cukai tembakau terhadap penerimaan negara. Kerugian ekonomi secara makro akibat penggunaan tembakau dinilai Kemenkes menunjukkan tren meningkat. Dengan adanya kenaikan ini pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai sebesar Rp 155,4 triliun pada 2018. Secara umum target penerimaan cukai pada 2018 naik 1,5% atau Rp2,24 triliun dari target APBN Perubahan 2017 yang sebesar Rp 153,2 triliun.

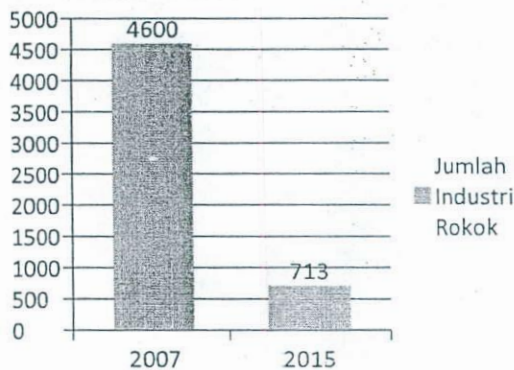


Hingga 29 Juni 2018 realisasi penerimaan cukai mencapai Rp 50,21 triliun. Pencapaian tersebut memenuhi 32,32% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 155,4 triliun. Hasil realisasi penerimaan pada semester satu ini mengalami kenaikan positif dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya. Meningkatnya penerimaan negara yang bersumber dari cukai tembakau menjadi tanda bahwa peran industri rokok bagi perekonomian negara memiliki dampak yang cukup besar. Tingginya kontribusi industri rokok bagi perekonomian tak lepas dari besarnya jumlah perokok di Indonesia. Dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi merokok di Indonesia sangat tinggi, khususnya pada laki-laki.

Kebijakan menaikkan tarif cukai pada dasarnya bukan masalah yang sederhana. Tahun 2017 penerimaan negara yang berasal dari hasil cukai tembakau sebesar Rp 145,47 triliun. Hal ini membuat cukai tembakau menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Di sisi lain kenaikan tarif cukai diperlukan untuk menekan jumlah pengeluaran di bidang kesehatan yang ditimbulkan akibat rokok.

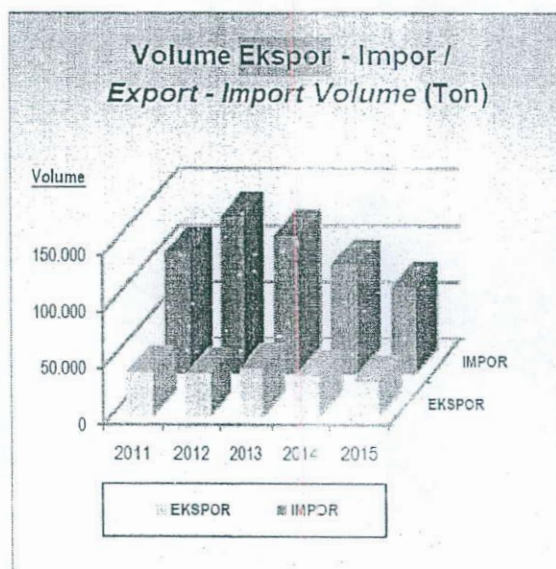
Sedikitnya Rp50 triliun digelontorkan untuk biaya kesehatan masyarakat terkait dampak rokok.

Kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok membuat jumlah perusahaan pengolahan hasil tembakau semakin berkurang. Kenaikan cukai hasil tembakau membebani perusahaan-perusahaan rokok kecil sehingga banyak yang mengalami bangkrut karena tidak sanggup membeli cukai. Hampir setiap tahunnya pemerintah menaikkan tarif cukai, terutama pada cukai rokok. Penetapan kenaikan tarif cukai yang berubah-ubah setiap tahun ini dapat membuat pelaku industri baik skala besar dan kecil kesulitan dalam menentukan langkah bisnis kedepan.



Data Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pabrik rokok pada 2007 berjumlah lebih dari 4.600 pabrik, tapi pada 2015 hanya tinggal 713. Jumlah tersebut terdiri atas 246 pabrik rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM), 441 pabrik rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT), dan 26 pabrik rokok Sigaret Putih Mesin (SPM). Demikian pula jumlah pekerja di sektor pengolahan tembakau yang berkurang seiring menurunnya jumlah industri rokok.

Untuk itu seharusnya pemerintah segera mencari solusi sumber penerimaan lain yang tidak berimbas pada penurunan pendapatan masyarakat yang bekerja pada industri pengolahan tembakau. Pemerintah dapat memberikan pengarahan dan pelatihan terutama kepada para petani tembakau agar mulai mengoptimalkan jumlah ekspor tembakau ke luar negeri.



Berdasarkan data dari kementerian pertanian jumlah ekspor tembakau Indonesia masih kalah dengan jumlah tembakau yang masuk ke dalam negeri. Padahal jika dilihat dari Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Indonesia masih memiliki peluang yang cukup besar untuk mengoptimalkan pendapatan dari cukai tembakau yang diekspor ke luar negeri.

Untuk itu regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebaiknya lebih dioptimalkan dalam mendukung kegiatan ekspor tembakau sehingga masyarakat penghasilannya bergantung

LAMPIRAN KEGIATAN 5

Membuat draft kajian analisis ringkas cepat

Evaluasi Penyerapan DAK Fisik di Daerah Semester I Tahun 2018

Dalam rapat kerja penyampaian keterangan pemerintah atas realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN semester I 2018 antara Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tanggal 17 Juli 2018, Pemerintah menyampaikan adanya sejumlah masalah dalam pelaksanaan realisasi APBN di semester pertama tahun 2018. Salah satu masalah yang disoroti adalah rendahnya realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) pada semester I 2018.

Realisasi DAK Fisik Tahun 2016 - 2018



Pada tahun 2018 pemerintah mengalokasikan DAK Fisik sebesar Rp62,43 triliun dimana proses penyalurannya dibagi dalam 3 tahap. Untuk tahap I penyaluran sebesar 25% dari pagu alokasi yang pencairannya dilaksanakan antara bulan Februari – Juli 2018. Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan realisasi penyerapan DAK fisik pada semester I 2018 hanya sebesar Rp7,8 triliun atau 12,4% terhadap APBN. Jumlah ini menurun drastis dibandingkan dengan realisasi semester I pada tahun 2017 yang mencapai Rp17,4 triliun atau 25,1% terhadap APBN.

Berdasarkan laporan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, penyebab dari menurunnya realisasi penyerapan DAK Fisik pada semester pertama tahun 2018 akibat adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pergantian pucuk kepemimpinan di daerah berdampak pada kebijakan pembuatan kontrak proyek infrastruktur. Kurang sinkronnya perencanaan antara kementerian/lembaga dan daerah juga menjadi penyebab keterlambatan penyaluran DAK Fisik pada semester ini.

Dari sisi perencanaan masih terdapat permasalahan kurang tepatnya penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tambahan kepada sejumlah daerah. Hingga saat ini masih terdapat berbagai fokus permasalahan, antara lain sejumlah daerah mendapatkan alokasi lebih besar dari proposal yang diajukan, mengajukan alokasi tetapi tidak memperoleh dana alokasi, tidak mengajukan alokasi tetapi mendapatkan dana alokasi.

No	Jenis Masalah DAK Fisik	Jumlah
1	Mengusulkan alokasi tetapi tidak memperoleh dana alokasi.	109
2	Tidak mengusulkan alokasi tetapi mendapatkan dana alokasi	88
3	Mendapatkan alokasi lebih besar dari proposal yang diajukan	31

Kemudian, permasalahan realisasi DAK Fisik yang belum optimal disebabkan karena adanya perubahan mendasar mengenai mekanisme alokasi DAK Fisik. Pengalokasian DAK Fisik di tahun 2016 dilakukan dengan mekanisme bottom-up agar alokasi DAK Fisik sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional. Mekanisme bottom-up dilakukan dengan cara penyampaian usulan (proposal based) oleh daerah sebagai dasar untuk penentuan alokasi.

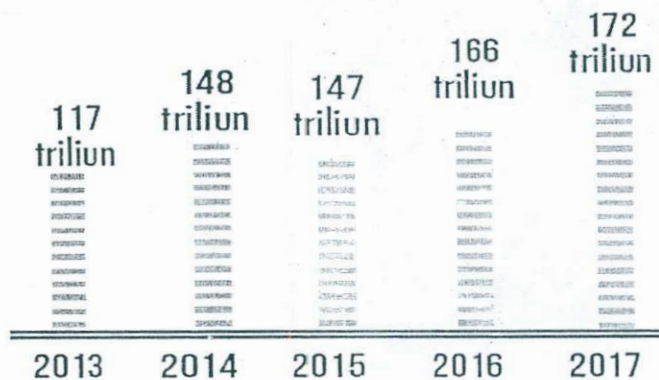
Hal ini berbeda dengan pengalokasian DAK pada tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak bersifat topdown, yakni sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu kriteria umum yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus yang terkait dengan kewilayahan, dan kriteria teknis yang terkait dengan data kebutuhan teknis daerah.

Merosotnya realisasi penyerapan DAK fisik ini harus menjadi fokus evaluasi pemerintah. Jika DAK Fisik dapat terserap dengan baik maka akan mampu mendorong program prioritas kerja pemerintah. Pertumbuhan infrastruktur dapat membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan dapat mengintegrasikan daerah satu dengan yang lainnya. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan daerah penerima DAK Fisik. Selain itu penguatan komunikasi antar lembaga terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Anggaran pada saat penyusunan anggaran akan meminimalisir terlambatnya pencairan DAK Fisik.

Pengaruh Efektifitas Penyertaan Modal Negara Terhadap Peningkatan Laba BUMN

Tugas dan fungsi penatausahaan Penyertaan Modal oleh pemerintah merupakan konsekuensi kepemilikan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan RUU APBN 2019 pemerintah mengalokasikan 17,8 triliun untuk menyuntik modal pada 3 BUMN yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Hutama Karya, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Dalam perkembangannya, kebijakan pemerintah untuk menyertakan modalnya pada BUMN tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja BUMN. Beberapa BUMN malah merugi setelah mendapatkan suntikan dana dari negara.

Grafik Laba BUMN Tahun 2013 – 2017



Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian BUMN tahun 2017, total laba dari seluruh BUMN pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp 172 triliun, meningkat dari posisi akhir tahun 2016 sebesar Rp 166 triliun. Kontribusi peningkatan laba terbesar berasal dari sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Konstruksi, dan sektor Informasi dan Komunikasi.

Namun, laba yang dihasilkan oleh BUMN pada sektor energi, logistik, kawasan dan pariwisata, masih jauh dari target yang ditetapkan. Tahun 2017 laba BUMN pada sektor tersebut mencapai Rp32,90 Trilyun atau hanya 54,0% dari target Perjanjian Kinerja tahun 2017 sebesar Rp60,83 Trilyun. PLN menjadi BUMN penyumbang penurunan laba terbesar pada sektor ini.

Meskipun laba BUMN sektor energi tahun sebelumnya tidak tercapai, namun sektor ini masih diandalkan untuk membantu memberi sumbangsih lebih kepada penerimaan negara pada tahun depan, contohnya PT Pertamina dan PT PLN. Kementerian BUMN harus bekerja lebih keras terhadap permintaan setoran dividen pada tahun depan. Pertamina mengalami tekanan performa keuangan karena harga minyak yang menanjak dibandingkan tahun lalu. Sepanjang semester I tahun ini, rata-rata harga minyak mentah Indonesia tercatat di angka US\$48,84 per barel atau naik 35,06 persen dibanding tahun sebelumnya US\$36,16 per barel.

PT PLN juga diperkirakan tidak sanggup untuk menyetor target deviden di tahun depan. Keuangan perusahaan PT PLN tertekan karena meningkatnya harga batu bara dari tahun ini. Kinerja keuangan PLN semakin terbebani dengan menjalankan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, khususnya di pembangunan transmisi. Di sisi lain, pemerintah tidak mengubah tarif listrik sejak awal tahun 2018.

Jika dilihat dari segi kapasitas keuangan, BUMN sektor energi masih berkutat dengan manajemen keuangan perusahaan yang tradisional melalui pembiayaan dengan cara melakukan pinjaman ke bank, menjual saham, dan mengeluarkan obligasi, serta pemanfaatan dana internal perusahaan. Dengan tata kelola keuangan seperti ini perusahaan hanya akan berfokus pada cara mengatur hutang perusahaan yang diperoleh.

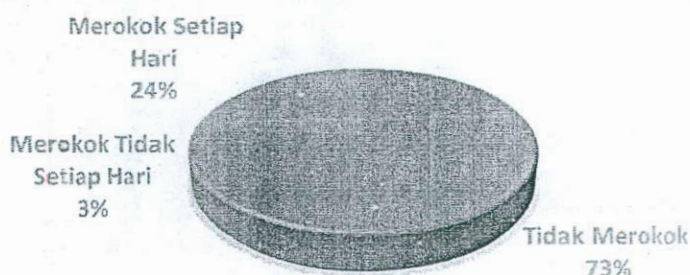
Padahal, pemerintah juga bisa berperan dalam membuat diversifikasi dalam membantu keuangan BUMN yaitu dengan pengelolaan dividen BUMN. Pemerintah dapat mengonversi dividen menjadi penyertaan modal negara. Sebagai contoh, dividen yang dibagikan 40% dari laba. Pemerintah hanya mengambil 20%, sisanya ditanamkan kembali dalam bentuk PMN. Sehingga kapasitas *leverage* keuangan perusahaan akan bertambah. Tapi pada saat ini ada kendala yang dihadapi oleh BUMN, yaitu adanya target realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari dividen BUMN yang setiap tahun targetnya terus naik. Padahal BUMN memerlukan relaksasi dari pemerintah. Dengan menurunkan target dividen yang disetorkan BUMN kepada negara.

Untuk selanjutnya akan lebih baik jika BUMN tidak terlalu mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Jika membutuhkan tambahan modal (*equity financing*), perusahaan dapat melibatkan investor swasta. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan manajer investasi agar mengajak investornya menanamkan modal pada BUMN yang menjalankan proyek infrastruktur. Sasaran dari investor ini adalah pihak yang mengelola dana jangka panjang seperti dana pensiun. Pengelola dana pensiun sebaiknya tidak lagi berpikir membeli bond dan deposito. Tapi mulai menginvestasikan dana yang dikelola kepada sektor riil yaitu infrastruktur.

Evaluasi Dampak Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Perekonomian dan Produksi Tembakau Domestik

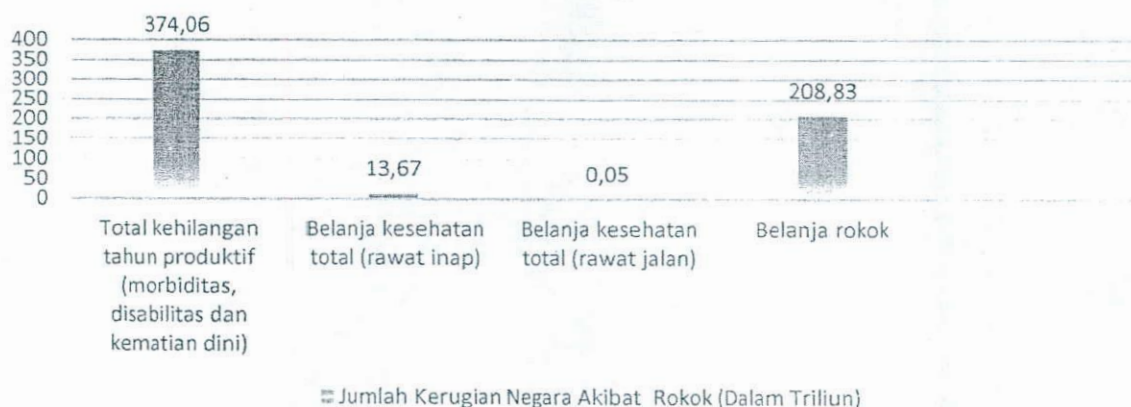
Berdasarkan data dari WHO, Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. Pada tahun 2030 diperkirakan angka kematian akibat rokok di dunia akan mencapai 10 juta jiwa dan 70% di antaranya berasal dari Negara berkembang seperti Indonesia. Hingga saat ini secara keseluruhan jumlah perokok aktif masih kalah dengan masyarakat yang tidak merokok, namun setiap tahunnya jumlah perokok aktif selalu mengalami kenaikan.

PERSENTASE PEROKOK AKTIF DAN PEROKOK PASIF



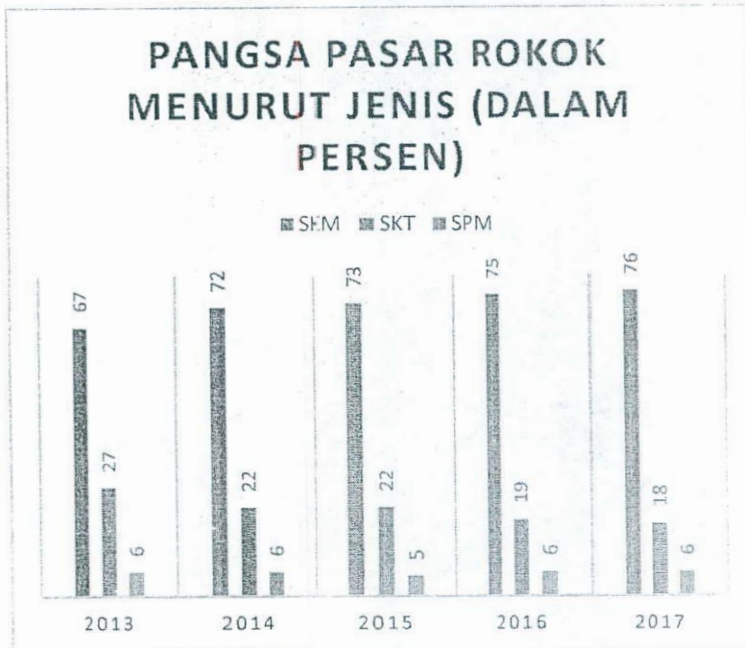
Sementara itu, dilihat dari intensitas merokok, pemuda yang menjadi perokok berat jauh lebih banyak dibandingkan perokok biasa. Perokok berat adalah seseorang yang merokok sedikitnya satu batang setiap hari. Konsumsi rokok yang meningkat semakin memperberat beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok. Penyakit terkait rokok menyebabkan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

KERUGIAN NEGARA AKIBAT ROKOK TAHUN 2015



Sumber: Balitbang Kementerian Kesehatan

Pemerintah berpendapat telah menerapkan langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi merokok, tetapi disisi lain tetap menahan diri dari penerapan kebijakan lainnya yang akan mengganggu konsumsi rokok dengan memperhatikan berbagai aspek, yaitu kondisi Industri Hasil Tembakau (IHT) dan tenaga kerja, optimalisasi penerimaan perpajakan dari sektor cukai, serta peredaran rokok ilegal.



Pada tahun 2014 lebih dari 85 persen tenaga kerja di industri hasil tembakau bekerja di jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT). Tetapi dari segi pangsa produksi, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) paling besar (76 persen pada 2017). Sementara SKT hanya menyumbang 18 persen pada tahun 2017. Perkembangan pangsa produksi menunjukkan telah terjadi penurunan pada jenis SKT. Pada 2012 pangsa produksi SKT mencapai 29 persen terhadap total IHT, namun semakin menurun hingga pada 2017 hanya mencapai 18 persen.

Perusahaan berskala kecil sangat rentan terkena dampak cukai. Misalnya, untuk rokok golongan 2 merasa dirugikan dengan aturan volume merging yang dicantumkan dalam pasal 3 PMK 146/2017. Pabrik berskala kecil terpaksa harus melakukan konsolidasi, seperti menurunkan produksi atau pengurangan jumlah tenaga kerja, atau bahkan terpaksa gulung tikar karena tidak mampu berkompetisi.

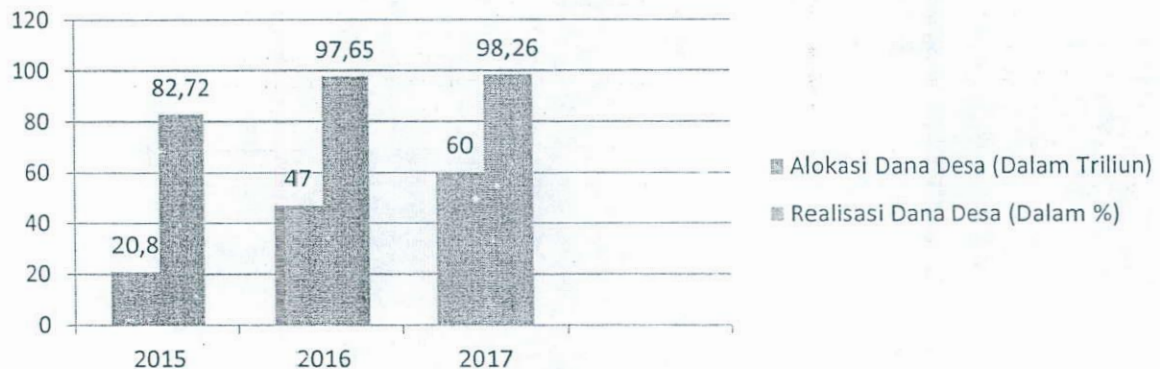
Pemerintah disamping berperan untuk mengurangi konsumsi rokok, juga berkewajiban untuk melindungi para pekerja IHT dan petani tembakau, salah satunya dengan memberikan fasilitas pelatihan mengenai teknik rajangan tembakau agar sesuai dengan standar pabrika. Sehingga produk olahan tembakau yang dihasilkan bisa lebih berkualitas dan industri hasil tembakau bisa terdorong untuk mendapatkan pangsa pasar baru untuk menjual hasil olahan tembakau mereka. Selain itu untuk mendorong perekonomian daerah penghasil tembakau, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk program pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan sosial.

Untuk program pembinaan industri, pemerintah dapat menyusun program fasilitas pelaksanaan kemitraan usaha kecil, menengah dan usaha besar. Sementara program pembinaan lingkungan sosial, pemerintah dapat melaksanakan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat meringankan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Efektifitas Dana Desa Untuk Mendorong Swasembada Pangan

Dana desa diformulasi untuk mendukung pemerataan pembangunan, percepatan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Setiap tahun terjadi peningkatan dalam penerimaan dan realisasi dana desa di Indonesia. Pada tahun 2015, realisasi serapan dana desa mencapai 82,72 persen. Jumlah realisasi tersebut meningkat di tahun 2016 menjadi 97,65 persen dan 98,26 persen di tahun 2017. Sementara hingga 31 Juli 2018 realisasi dana desa mencapai Rp35,86 triliun (59,8 persen). Pemerintah telah menganggarkan dana desa sebesar 73 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Alokasi dan Realisasi Dana Desa Tahun 2015 - 2017



Hasil evaluasi secara nasional Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa), penerima aliran dana desa menggunakan 80 persen untuk membiayai infrastruktur. Rinciannya, dalam tiga tahun terakhir ini dana desa digunakan untuk membangun 1.960 km jembatan, 5.220 unit pasar desa, 5.116 unit tambatan perahu, 2.047 unit embung, 97.176 unit irigasi lebih dari 120.000 km jalan. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk pembangunan 32.711 unit sarana air bersih, 291.393 unit penahan tanah, 6.041 unit poliklinik desa, 82.356 unit MCK, dan 45.865 unit sumur.

Sisanya dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kewirausahaan untuk para pemuda agar lebih produktif dan mandiri. Selain itu terdapat pula pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perencanaan bisnis. Uraian tersebut menjelaskan, penggunaan dana desa belum maksimal untuk pertanian.

Dana desa yang dialokasikan untuk desa, dimana sebagian besar penduduknya memiliki pekerjaan sebagai petani, belum mampu membuat mereka sejahtera. Selama ini dana desa memang cukup menyerap tenaga kerja dari kalangan usia produktif, melalui perbaikan sarana dan prasarana serta wirausaha dengan sistem pengembangan wisata. Tetapi, dana desa yang digunakan seperti ini akan membuat masyarakat di desa semakin jauh dari usaha dalam bidang pertanian. Padahal bidang pertanian merupakan kunci untuk mendukung kemandirian pangan desa.

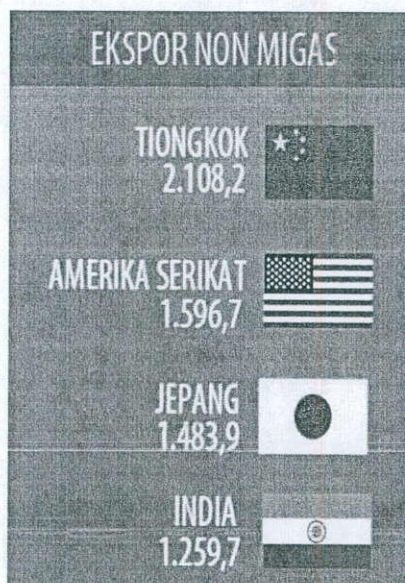
Membangun kemandirian pangan berbasis desa dapat dilakukan dengan berbagai langkah. Misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai wadah pengelolaan dana sekaligus agen penyaluran modal usaha sektor-sektor pangan. Petani desa bisa mendapatkan modal untuk menjalankan usaha di sektor pertanian, misal untuk membeli benih, pupuk, dan perlengkapan bertani. Karena selama ini penyedia jasa keuangan seperti bank masih enggan untuk memberikan pinjaman kepada petani.

BUMDes juga bisa berperan sebagai distributor kebutuhan untuk bertani sekaligus sebagai agen penjualan hasil pertanian. Mulai dari proses tanam, perawatan dari hama, hingga tahap panen, membeli dan menggiling jadi beras lalu menyimpan dan menyalurkannya sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah.

Keuntungan lain yang didapatkan dengan adanya BUMDes adalah lokasinya yang strategis. Karena berlokasi di desa, BUMDes lebih mudah di akses oleh petani dan masyarakat desa pada umumnya. Yang perlu disupport oleh pemerintah adalah bantuan permodalan, peralatan giling padi, kelengkapan administrasi modern seperti komputer, jaringan telepon dan internet serta pelatihan tata kelola usaha yang baik. Selain itu pelatihan pembukuan, manajemen logistik dan distribusi juga diperlukan untuk mendukung sistem administrasi BUMDes. Agar lebih efisien akan lebih baik jika kantor BUMDes berlokasi di wilayah Kantor Kepala Desa.

Peluang Merebut Pasar Ekspor Dalam Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok

Dalam 3 bulan terakhir rupiah mengalami tren pelemahan yang cukup signifikan, bahkan sempat menyentuh angka Rp15.000 per USD. Salah satu penyebab dari pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini adalah karena neraca perdagangan Indonesia yang terus mengalami defisit. Sentimen negatif dari pasar terhadap defisit neraca perdagangan menyebabkan IHSG dan rupiah terus merosot. Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik pada tanggal 17 September 2018 Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan ke enam kalinya sepanjang tahun 2018. Artinya nilai impor Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah ekspor. Di sisi lain, kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui penyesuaian PPh impor pasal 22 juga dinilai tak akan berefek signifikan karena barang konsumsi hanya menyumbang sekitar 10% terhadap total impor dan menyasar komoditas yang tak terlalu dibutuhkan.



*Data ekspor selama Agustus 2018 (Dalam Juta USD)
Sumber: BPS

Untuk mengatasi masalah defisit neraca perdagangan pemerintah bisa menambah jumlah ekspor dengan memanfaatkan peluang dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Perang dagang tak selalu membawa dampak negatif bagi perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Karena jika melihat dari data statistik ekspor, kedua negara tersebut merupakan tujuan ekspor terbesar bagi Indonesia terutama untuk sektor non migas. Selama bulan Agustus 2018, Amerika Serikat dan Tiongkok masing-masing memiliki porsi ekspor sebesar US\$1,59 miliar dan US\$ 2,1 miliar. Selain itu sepanjang tahun 2017 juga telah menyumbangkan porsi sebesar 10,5% dan 13,7% terhadap nilai ekspor Indonesia.

Potensi penurunan nilai dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok bisa dimanfaatkan Indonesia untuk masuk ke pasar masing – masing. Indonesia bisa menambahkan jumlah ekspor komoditas unggulan. Secara spesifik untuk ke pasar impor Tiongkok, Indonesia bisa mengoptimalkan untuk menambah jumlah ekspornya seperti bubur kayu, ferrcnikel, karet mineral, serta produk kayu. Sedangkan untuk ke pangsa pasar Amerika, Indonesia bisa menambah jumlah ekspornya untuk komoditas laut seperti udang dan udang galah, minyak sawit, kepiting, karet, benang rajutan katun, pakaian wanita, serta sepatu olahraga.

Data Ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat yang bisa dioptimalkan oleh Indonesia
(Dalam ribuan dollar)

No	Jenis Produk Ekspor	Nilai Ekspor Tahun 2017
1	Buah – Buahan	859,511
2	Sayur – sayuran	753,383
3	Teh, Cabai	297,143
4	Hasil Perikanan	2,688,345
5	Tembakau (Mentah)	1,019,849

Sumber ; The U.S. Census Bureau

Data Ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok yang bisa dioptimalkan oleh Indonesia
(Dalam ribuan dollar)

No	Jenis Produk Ekspor	Nilai Ekspor Tahun 2017
1	Buah – Buahan	378,201
2	Sayur – sayuran	147,974
3	Kapas (Mentah)	978,185
4	Hasil Perikanan	1,325,395
5	Tembakau (Mentah)	162,297

Sumber ; The U.S. Census Bureau

Ada berbagai langkah yang harus pemerintah tempuh untuk dapat memanfaatkan peluang dagang yang lebih besar dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok. Yang pertama adalah dengan meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dan promosi dagang ke negara tersebut. Langkah lain yang bisa pemerintah ambil didalam mendukung kebijakan ekspor adalah dengan memberikan kebijakan yang dapat mempermudah pelaku bisnis dalam melakukan ekspor produknya ke luar negeri, misalnya dengan memberikan kebijakan insentif pajak dan mempermudah regulasi terkait ekspor produk.

Meski begitu, untuk mengambil peluang ekspor ke masing-masing negara tidaklah mudah. Misalnya untuk melakukan ekspor, Indonesia masih membutuhkan bahan baku dan material sehingga masih ada ketergantungan dari faktor produksi dan harga patokan dunia. Untuk itu pemerintah dan pelaku usaha mesti mengupayakan peningkatan industri manufaktur yang berorientasi ekspor dengan bahan baku lokal. Dengan memanfaatkan material lokal dalam proses produksi untuk produk ekspor maka akan membawa dampak juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah.

Selain itu Indonesia juga masih harus bersaing dengan negara – negara eksportir lain yang ada di Asean seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand. Untuk itulah pemerintah diharapkan bisa lebih mengoptimalkan sektor yang menjadi peluang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Tiongkok, yaitu sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

Dokumen Catatan Saran Persentasi Aanalisis Ringkas Cepat

“Evaluasi Penyerapan DAK Fisik di Daerah Semester I Tahun 2018”

Tanggal 31 Juli 2018

1. **Jelaskan tentang kurang sinkronnya perencanaan antara kementerian / lembaga dan daerah menjadi penyebab keterlambatan penyaluran DAK Fisik**
2. **Tambahkan data dari BPK untuk memperkuat hasil analisa**
3. **Tambahkan analisa tentang sifat DAK Fisik terkait perencanaan dan alokasi yang disetujui kadang tidak sesuai**
4. **Tambahkan tantangan apa saja terkait penyerapan DAK Fisik**
5. **Judul ARC sebaiknya diperbaiki**

Dokumen Catatan Saran Persentasi Aanalisis Ringkas Cepat

“Evaluasi Dampak Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Perekonomian dan Produksi Tembakau Domestik”

Tanggal 21 Agustus 2018

1. Sesuaikan jumlah paragraf, maksimal 2 halaman
2. Tambah analisa tentang dana bagi hasil cukai
3. Penguatan argumen dari awal paragraf
4. Dijelaskan lebih detail tentang kerugian BPJS akibat rokok
5. Dimasukan tabel/ grafik tentang jumlah perokok aktif dan perokok pasif
6. Tambah rekomendasi tentang peran pemerintah untuk memberikan pangsa pasar baru untuk perusahaan / petani tembakau

Dokumen Catatan Saran Persentasi Aanalisis Ringkas Cepat
“Efektifitas Dana Desa Untuk Mendorong Swasembada Pangan”

Tanggal 21 Agustus 2018

1. Dikuatkan lagi pendapat mengenai pemberdayakan lagi BUMDes
2. Buat grafik impor beras antara tahun 2015 – 2017
3. Gali lagi tentang penggunaan Dana Desa antara tahun 2015 – 2017
4. Analisa lagi penggunaan dana desa untuk faktor produksi pertanian

Dokumen Catatan Saran Persentasi Aanalisis Ringkas Cepat
“Peluang Merebut Pasar Ekspor Dalam Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok”

Tanggal 24 September 2018

1. Diberikan rekomendasi jangka pendek terkait ekspor indonesia ke Tiongkok atau Amerika Serikat
2. Data ekspor Impor China dan Amerika Serikat
3. Ditambahkan analisa terkait sektor apa saja yang perlu diprioritaskan pemerintah
4. Ditambahkan apa saja yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperlancar ekspor ke luar negeri

Dokumen Catatan Saran Persentasi Aanalisis Ringkas Cepat

“Pengaruh Efektifitas Penyertaan Modal Negara Terhadap Peningkatan Laba BUMN”

Tanggal 24 September 2018

1. **Evaluasi kembali pernyataan tentang potensi SDA untuk BUMN sektor energi**
2. **Sumber modal untuk BUMN dikoreksi lagi**
3. **Tabel dikasih judul**
4. **Lingkup bahasan BUMN di perkecil, ke sektor yang spesifik**



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : www.dpr.go.id

Nomor : BK/12944/SETJEN DAN BK-DPR RI/PA/07/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Juli 2018

Yth

1. Kepala BAKN;
2. Analis APBN BAKN;
3. Kasub TU Pusat Kajian Anggaran;
4. Analis APBN dan Staf Pusat Kajian Anggaran;
5. Analis APBN Non Fungsional Pusat Kajian Anggaran.

Badan Keahlian DPR RI
Jakarta

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Kajian Anggaran bermaksud mengundang Saudara/Saudari pada acara rapat koordinasi Pusat Kajian Anggaran dengan instansi pihak lain yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Agustus 2018
Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran
Gedung Sekretariat Jenderal DPR Lantai 6
Acara : Rapat Koordinasi dengan tema "Presentasi Analisis Ringkas dan Aktualisasi CPNS"

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat waktunya.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si
NIP. 19710911 199703 1 005

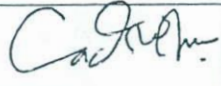




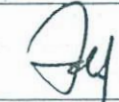

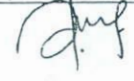

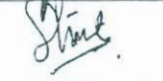
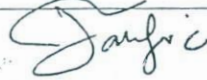
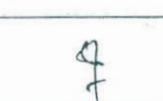
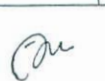



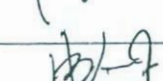
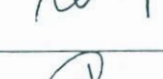



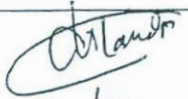



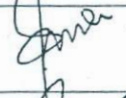
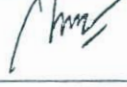
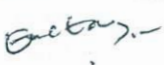


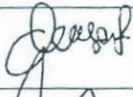

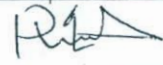
**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : www.dpr.go.id

**DAFTAR HADIR RAPAT
RAPAT KOORDINASI PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DEWAN
DENGAN BAKN
DENGAN TEMA
"PRESENTASI ANALISIS RINGKAS CEPAT AKTUALISASI CPNS"**

Hari, tanggal : Rabu, 1 Agustus 2018
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran
Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR Lt.6

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DR. ASEP AHMAD SAEFULOH, SE., M.SI.	KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
2.	MARDI HARJO, S.E., M.SI	KEPALA BAGIAN BAKN	
3.	HUSNUL LATIFAH, S.SOS.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	
4.	SLAMET WIDODO, SE., ME	KORBID TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	
5.	RASTRI PARAMITA, SE., MM	KORBID PERENCANAAN DAN ASUMSI MAKRO	
6.	ROBBY ALEXANDER SIPAIT, SE., ME	KORBID BELANJA PEMERINTAH PUSAT	
7.	DWI RESTI PRATIWI, S.T, MPM	KORBID PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN	
8.	MARIHOT NASUTION, SE, M.SI	ANALIS APBN	
9.	ADHI PRASETYO SATRIO W., S.M.	ANALIS APBN	
10.	MARTHA CAROLINA, SE. AK., M.AK	ANALIS APBN	
11.	RATNA CHRISTIANINGRUM, S.SI, M.SI	ANALIS APBN	

12.	ADE NURUL AIDA, SE.	ANALIS APBN	
13.	DAHIRI, S.SI., M.SC	ANALIS APBN	
14.	JESLY YURIATY PANJAITAN, SE., MM	ANALIS APBN	
15.	RENDY ALVARO, S.SOS	ANALIS APBN	
16.	SITI RAHMAWATI, SE	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
17.	MEMED SOBARI	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
18.	MUSBIYATUN	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
19.	HILDA PISKA RANDINI, S.I.P.	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
20.	LARAS LINTANG ASMORO, SE., MM	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
21.	RIZA ADITYA SYAFRI, S AK	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
22.	MUTIARA SHINTA ANDINI SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
23.	TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
24.	RICKA WARDIANINGSIH, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
25.	ANISA FIRIA WULANINGTYAS, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
26.	ERVITA LULUK ZAHARA, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
27.	FRANSINA NATALIA MAHJDIN, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
28.	MUJIBURRAHMAN, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
29.	HIKMATUL FITRI, SE., M.Sc	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
30.	DYAH MAYSARA, S.HUT	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	

31.	FADILA PUTI LENGGO G, SE., MM	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
32.	FIRLY NUR AGUSTIANI, SE., MM	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
33.	OLLANI FABIOLA BANGUN, S.IP., MM	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
34.	FEBRINA ELIA N, S.Pd., M.Sc	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
35.	NURUL AZIZAH AZZAKIYYAH, SE., M.SC	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
36.	MATIUS WINARNO, SE., MBA	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
37.	EMILIA OCTAVIA, ST., M Ak	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
38.	IRANISA, SE., M.Acc	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
39.	RAHAYUNINGSIH, S.Pd	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
40.	DEASY DWI RAMIAYU, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
41.	DESSY MULYANTI	-	
42.	RAMA WARDIANSYAH	-	
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			

LAPORAN SINGKAT RAPAT

Jenis Rapat	: Rapat Koordinasi Pusat Kajian Anggaran dengan Instansi Pihak Terkait
Hari, Tanggal	: Rabu, 1 Agustus 2018
Pukul	: 09.00 WIB – 12.00 WIB
Tempat	: R. Rapat Pusat Kajian Anggaran Lt. 6 Gd. Sekretariat Jenderal DPR-RI
Acara	: Rapat Koordinasi dengan tema "Presentasi Analisis Ringkas Cepat Aktualisasi CPNS"
Pimpinan Rapat	: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si (Kepala Pusat Kajian Anggaran)
Sekretaris Rapat	: Rastri Paramita, S.E., M.M.
Hadir	: 1. Kabag BAKN; 2. Analis APBN BAKN dan PKA; 3. Kasubag TU Pusat Kajian Anggaran; 4. Staf TU Pusat Kajian Anggaran.

• PENDAHULUAN

Peningkatan kapasitas sumber daya manusa (SDM) Pusat Kajian Anggaran menjadi kebutuhan karena perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang selalu dinamis. Pembaharuan informasi, metode, dan *update* data sangat penting demi profesionalisme SDM Pusat Kajian Anggaran dalam memberikan dukungan keahlian terkait anggaran kepada Anggota DPR RI.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si, diikuti Kepala Bagian BAKN, Kasubag TU Pusat Kajian Anggaran, Analis APBN dari BAKN dan PKA serta Staf TU Pusat Kajian Anggaran. Selanjutnya, dilakukan diskusi dengan peserta rapat.

- **KESIMPULAN / KEPUTUSAN :**

Acara ini berlangsung dengan baik, dengan hasil dari diskusi sebagai berikut:

1. Terkait permasalahan realisasi DAK Fisik yang belum optimal disebabkan karena adanya perubahan mendasar mengenai mekanisme alokasi DAK Fisik;
2. Pengalokasian DAK Fisik di tahun 2016 dilakukan dengan mekanisme bottom-up agar alokasi DAK Fisik sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional;
3. Mekanisme bottom-up dilakukan dengan cara penyampaian usulan (proposal based) oleh daerah sebagai dasar untuk penentuan alokasi;
4. Merosotnya realisasi penyerapan DAK fisik ini harus menjadi fokus evaluasi pemerintah. Jika DAK Fisik dapat terserap dengan baik maka akan mampu mendorong program prioritas kerja pemerintah;
5. Pertumbuhan infrastruktur dapat membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan dapat mengintegrasikan daerah satu dengan yang lainnya;
6. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan daerah penerima DAK Fisik. Selain itu penguatan komunikasi antar lembaga terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Anggaran pada saat penyusunan anggaran akan meminimalisir terlambatnya pencairan DAK Fisik.

- **PENUTUP**

Demikian acara Rapat Koordinasi dengan tema "Presentasi Analisis Ringkas Cepat Aktualisasi CPNS" di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Kepala Pusat Kajian Anggaran,



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si
NIP. 19710911 199703 1 005



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : www.dpr.go.id

Nomor : BK/13889/SETJEN DAN BK-DPR RI/PA/08/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

20 Agustus 2018

Yth

1. Kepala Biro Persidangan II;
2. Kepala Bagian Sekretariat BAKN;
3. Kasub TU Pusat Kajian Anggaran;
4. Analis APBN dan Staf Pusat Kajian Anggaran;
5. Analis APBN Non Fungsional Pusat Kajian Anggaran.

Badan Keahlian DPR RI
Jakarta

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusat Kajian Anggaran bermaksud mengundang Saudara/Saudari pada acara rapat koordinasi Pusat Kajian Anggaran dengan instansi pihak terkait yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Agustus 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran
Gedung Sekretariat Jenderal DPR Lantai 6
Acara : Rapat Koordinasi dengan tema Presentasi Analisis Ringkas Cepat
Peningkatan Cukai Rokok

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si.
NIP. 19710911 199703 1 005


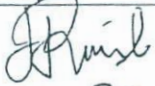


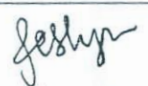



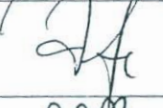


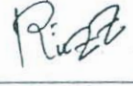
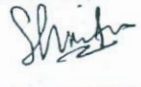


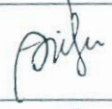





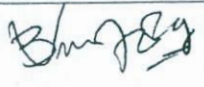

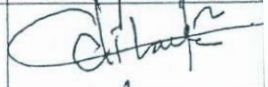

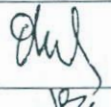

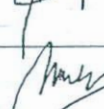
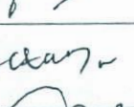
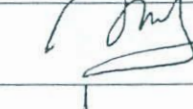


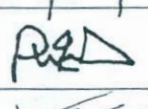



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : www.dpr.go.id

**DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI
PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DEWAN DENGAN INSTANSI TERKAIT
DENGAN TEMA
PRESENTASI ANALISIS RINGKAS CEPAT PENINGKATAN CUKAI ROKOK**

Hari, tanggal : Selasa, 21 Agustus 2018
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran
Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR Lt.6

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DR. ASEP AHMAD SAEFULOH, SE., M.SI.	KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
2.	CHOLIDA INDRYANA, S.H.	KEPALA BIRO PERSIDANGAN II	
3.	MARDI HARJO, S.E., M.SI.	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT BAKN	-
4.	HUSNUL LATIFAH, S.SOS.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	
5.	SLAMET WIDODO, SE., ME	KORBID TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	
6.	RASTRI PARAMITA, SE., MM	KORBID PERENCANAAN DAN ASUMSI MAKRO	
7.	ROBBY ALEXANDER SIRAIT, SE., ME	KORBID BELANJA PEMERINTAH PUSAT	
8.	DWI RESTI PRATIWI, S.T., MPM	KORBID PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN	
9.	SLAMET DHUL FADLI, S.E.	ANALIS APBN BAKN	
10.	MARIHOT NASUTION, SE, M.SI	ANALIS APBN	
11.	ADHI PRASETYO SATRIO W., S.M.	ANALIS APBN	

12.	MARTHA CAROLINA,SE.,AK.,M.AK	ANALIS APBN	
13.	RATNA CHRISTIANINGRUM,S.SI,M.SI	ANALIS APBN	
14.	ADE NURUL AIDA,SE.	ANALIS APBN	
15.	DAHIRI, S.SI., M.SC	ANALIS APBN	
16.	JESLY YURIATY PANJAITAN,SE.,MM	ANALIS APBN	
17.	RENDY ALVARO, S.SOS	ANALIS APBN	
18.	SITI RAHMAWATI, SE	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
19.	MEMED SOBARI	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
20.	MUSBIYATUN	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
21.	HILDA PISKA RANDINI, S.I.P.	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
22.	LARAS LINTANG ASMORO, SE., MM	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
23.	RIZA ADITYA SYAFRI, S AK	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
24.	MUTIARA SHINTA ANDINI, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
25.	TAUFIQ HIDAYATULLAH, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
26.	RICKA WARDIANINGSIH, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
27.	ANISA FIRIA WULANINGTYAS, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
28.	ERVITA LULUK ZAHARA, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
29.	FRANSINA NATALIA MAHUDIN, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
30.	MUJIBURRAHMAN, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	

31.	HIKMATUL FITRI, SE. M.Sc	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
32.	DYAH MAYSARA, S.HUT	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
33.	FADILA PUTI LENGGO G, SE., MM	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
34.	FIRLY NUR AGUSTIANI, SE., MM	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
35.	OLLANI FABIOLA BANGUN, S.IP., MM	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
36.	FEBRINA ELIA N, S.Pd., M.Sc	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
37.	NURUL AZIZAH AZZAKIYYAH, SE., M.SC	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
38.	MATIUS WINARNO, SE., MBA	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
39.	EMILIA OCTAVIA, ST., M.Ak	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
40.	IRANISA, SE., M.Acc	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
41.	RAHAYUNINGSIH, S.Pd	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
42.	DEASY DWI RAMIAYU, SE	ANALIS KAJIAN ANGGARAN NON FUNGSIONAL	
43.	DESSY MULYANTI	-	
44.	RAMA WARDIANSYAH	-	
45.	SLAMET DHUL FADLI, S.E.	ANALIS APBN BAKN	
46.			
47.			

LAPORAN SINGKAT RAPAT

Jenis dan Sifat Rapat	: Rapat Koordinasi Antar Instansi
Hari, Tanggal	: Selasa, 21 Agustus 2018
Pukul	: 10.00 - 11.45 WIB
Tempat	: R. Rapat Pusat Kajian Anggaran Lt. 6 Gedung Sekjen DPR RI
Acara	: Rapat Koordinasi Presentasi Analisis Ringkas Cepat Peningkatan Cukai Rokok.
Pimpinan Rapat	: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. (Kepala Pusat Kajian Anggaran).
Sekretaris Rapat	: Siti Rahmawati, S.E. (Staf Pusat Kajian Anggaran).
Hadir	: 1. Slamet Widodo, S.E., M.E. (Korbid Transfer Ke Daerah dan Dana Desa); 2. Rastri Paramita, S.E., M.M. (Korbid Perencanaan dan Asumsi Makro); 3. Robby Alexander Sirait, S.E., M.E. (Korbid Belanja Pemerintah Pusat); 4. Analis APBN dan Staf.

1. PENDAHULUAN

Rapat dibuka Pukul 10.00 WIB oleh Dr. Asep Ahmad Saefuloh (Kepala Pusat Kajian Anggaran), dilanjutkan pemaparan presentasi dengan Tema ARCPeningkatan Cukai Rokok oleh Saudara Slamet Dhul Fadli (Analis APBN BAKN) dan diikuti oleh Para Koordinator Bidang Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran, Analisis APBN dan Staf, selanjutnya dilakukan diskusi dengan peserta rapat.

2. KESIMPULAN/KEPUTUSAN/POKOK-POKOK PEMBAHASAN

- Pemaparan evaluasi dampak kenaikan tarif cukai hasil tembakau terhadap penerimaan negara dan produksi tembakau domestik antara lain:
 1. Terhitung tanggal 1 Januari 2018 Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10,04 persen.
 2. Kebijakan kenaikan cukai tersebut dalam rangka mengendalikan konsumsi rokok melalui kenaikan tarif cukai tembakau yang berimplikasi pada kenaikan rokok dan diharapkan mampu meredam konsumsi rokok di kalangan anak-anak dan remaja.
 3. Kebijakan tersebut diperkuat dengan rilis Kementerian Kesehatan yaitu beban pemerintah akibat rokok dan tembakau lebih tinggi ketimbang besaran kontribusi cukai tembakau terhadap penerimaan negara.
 4. Kerugian ekonomi makro akibat penggunaan tembakau dinilai Kemenkes menunjukkan tren meningkat.
 5. Adanya kenaikan tersebut pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai sebesar Rp155,4 triliun pada tahun 2018.
 6. secara umum target penerimaan cukai pada tahun 2018 naik sebesar 1,5% atau Rp2,24 triliun dari target APBN Perubahan tahun 2017 yang sebesar Rp153,2 triliun.
 7. Hingga 29 Jun 2018 realisasi penerimaan cukai mencapai Rp50,21 triliun. Pencapaian tersebut memenuhi 32,32 persen dari target dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp155,4 triliun. Hasil realisasi penerimaan pada semester satu ini mengalami kenaikan positif dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya.
 8. Meningkatnya penerimaan negara yang bersumber dari cukai tembakau menjadi tanda bahwa peran industri rokok bagi perekonomian negara memiliki dampak yang cukup besar. Tingginya kontribusi industri rokok bagi perekonomian tak lepas dari besarnya jumlah perokok di Indonesia. Dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi merokok di Indonesia sangat tinggi.
 9. Tahun 2017 penerimaan negara yang berasal dari hasil cukai tembakau sebesar Rp145,47 triliun merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Disisi lain kenaikan tarif cukai diperlukan untuk menekan jumlah pengeluaran di bidang kesehatan yang ditimbulkan akibat rokok. Sedikitnya Rp50 triliun digelontorkan untuk biaya kesehatan masyarakat terkait dampak rokok.

10. Kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok membuat jumlah perusahaan pengolahan hasil tembakau semakin berkurang. Kenaikan cukai hasil tembakau membebani perusahaan-perusahaan rokok kecil sehingga banyak yang mengalami bangkrut karena tidak sanggup membeli cukai.
 11. Hampir setiap tahunnya pemerintah menaikkan tarif cukai, terutama pada cukai rokok. Penetapan kenaikan tarif cukai yang berubah-ubah setiap tahun ini dapat membuat pelaku industri baik skala besar dan kecil kesulitan dalam menentukan langkah bisnis kedepan.
 12. Data Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pabrik rokok pada 2007 berjumlah lebih dari 4.600 pabrik, tapi pada 2015 hanya tinggal 713. Jumlah tersebut terdiri atas 246 pabrik rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM), 441 pabrik rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT), dan 26 pabrik rokok Sigaret Putih Mesin (SPM). Demikian pula jumlah pekerja di sektor pengolahan tembakau yang berkurang seiring menurunnya jumlah industri rokok.
 13. Untuk itu seharusnya pemerintah segera mencari solusi sumber penerimaan lain yang tidak berimbas pada penurunan pendapatan masyarakat yang bekerja pada industri pengolahan tembakau.
 14. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian jumlah ekspor tembakau Indonesia masih kalah dengan jumlah tembakau yang masuk ke dalam negeri. Padahal jika dilihat dari Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Indonesia masih memiliki peluang yang cukup besar untuk mengoptimalkan pendapatan dari cukai tembakau yang diekspor ke luar negeri.
 15. Untuk itu regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebaiknya lebih dioptimalkan dalam mendukung kegiatan ekspor tembakau sehingga masyarakat penghasilannya bergantung pada industri pengolahan tembakau tidak kehilangan sumber pendapatan utamanya.
- Memasukan tujuan setuju dan tidak setuju atas kenaikan tarif cukai dari pihak perusahaan dan pemerintah antara lain:
 1. Penetapan tarif rokok;
 2. Impact Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Sigaret Kretek Tangan (SKT) dalam kurun waktu tertentu;
 3. Masalah kesehatan yang ditimbulkan dari bahaya merokok pada masyarakat;
 4. Buat grafik kenaikan tariff cukai rokok pertahun dibandingkan dengan jumlah perokok aktif;

5. Perbandingan EPJS dengan pendapatan cukai rokok;
6. Penambahan data (buat dalam grafik) dari pemerintah mengenai penerimaan cukai dan dampak pengeluaran pemerintah untuk mengcover dampak dari tembakau rokok;
7. Pemerintah membuka pasar baru bagi tembakau untuk selain rokok. Contoh: untuk kosmetik dan obat;
8. Masuknya perusahaan rokok berskala besar pada negara berkembang lebih mudah dibanding dari negara asal perusahaan rokok itu sendiri;
9. Lihat masalah cukai rokok lebih komprehensif;
10. Memperhatikan jenis tulisan untuk Analisis Ringkas Cepat.

3. PENUTUP

Demikian acara Rapat Koordinasi Presentasi Analisis Ringkas Cepat Peningkatan Cukai Rokok, di lingkungan Pusat Kajian Anggaran dan Rapat Ditutup Pukul 11.45 WIB.

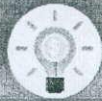
Kepala Pusat Kajian Anggaran,



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 19710911 199703 1 005

Dokumentasi Kegiatan 5: Pemaparan *Draft* Analisis Ringkas Cepat



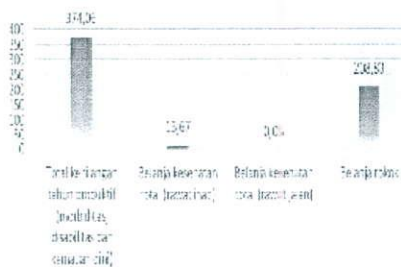


EVALUASI KENAIKAN TARIF CUKAI ROKOK

Berdasarkan data dari WHO, Indonesia merupakan Negara dengan jumlah perokok laki-laki terbanyak di dunia. Pada 2015, sedikitnya 1 dari 4 pemuda di Indonesia adalah seorang perokok. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas menunjukkan bahwa dari 61,7 juta orang pemuda yang berusia 16 sampai 30 tahun, 27 persen diantaranya merupakan perokok aktif.

Dampak Positif Jika Tarif Cukai Naik

KERUGIAN NEGARA AKIBAT ROKOK TAHUN 2015



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Kenaikan tarif cukai sebagai alat kontrol pemerintah untuk menekan jumlah perokok sehingga kerugian yang harus ditanggung BPJS akibat rokok bisa terkendali.

Dampak Negatif Jika Tarif Cukai Naik



Pekerja di Industri Hasi Tembakau akan kehilangan pekerjaan



Pabrik rokok jenis Sigaret Kretek Tangan terpaksa gulung tikar

Peran Pemerintah



Pemerintah dapat memberikan fasilitas pelatihan kepada para petani tembakau agar mampu menghasilkan tanaman tembakau yang berkualitas dan sesuai dengan standar pabrika. Sehingga para pengusaha dan petani tembakau bisa terdorong untuk mendapatkan pangsa pasar baru untuk menjual hasil tembakau mereka



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Realisasi DAK Fisik Semester I Tahun 2018

Alokasi Anggaran



Tahun 2018 :
Rp62,43 triliun

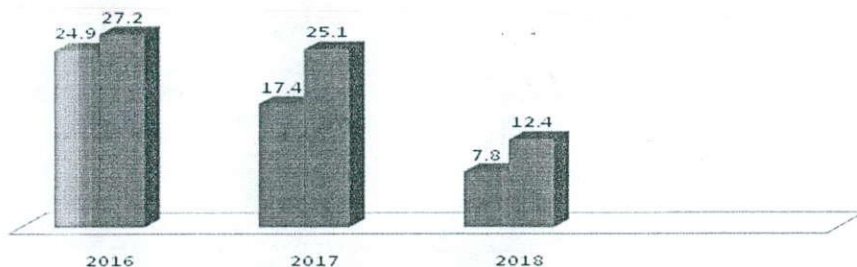
Realisasi DAK Fisik Semester I 2018



Rp7,8 triliun
12,4% dari Alkoasi DAK Fisik APBN

Realisasi DAK Fisik Tahun 2016 - 2018

■ Realisasi Penyerapan DAK Fisik (Dalam Triliun) ■ Persentase terhadap APBN

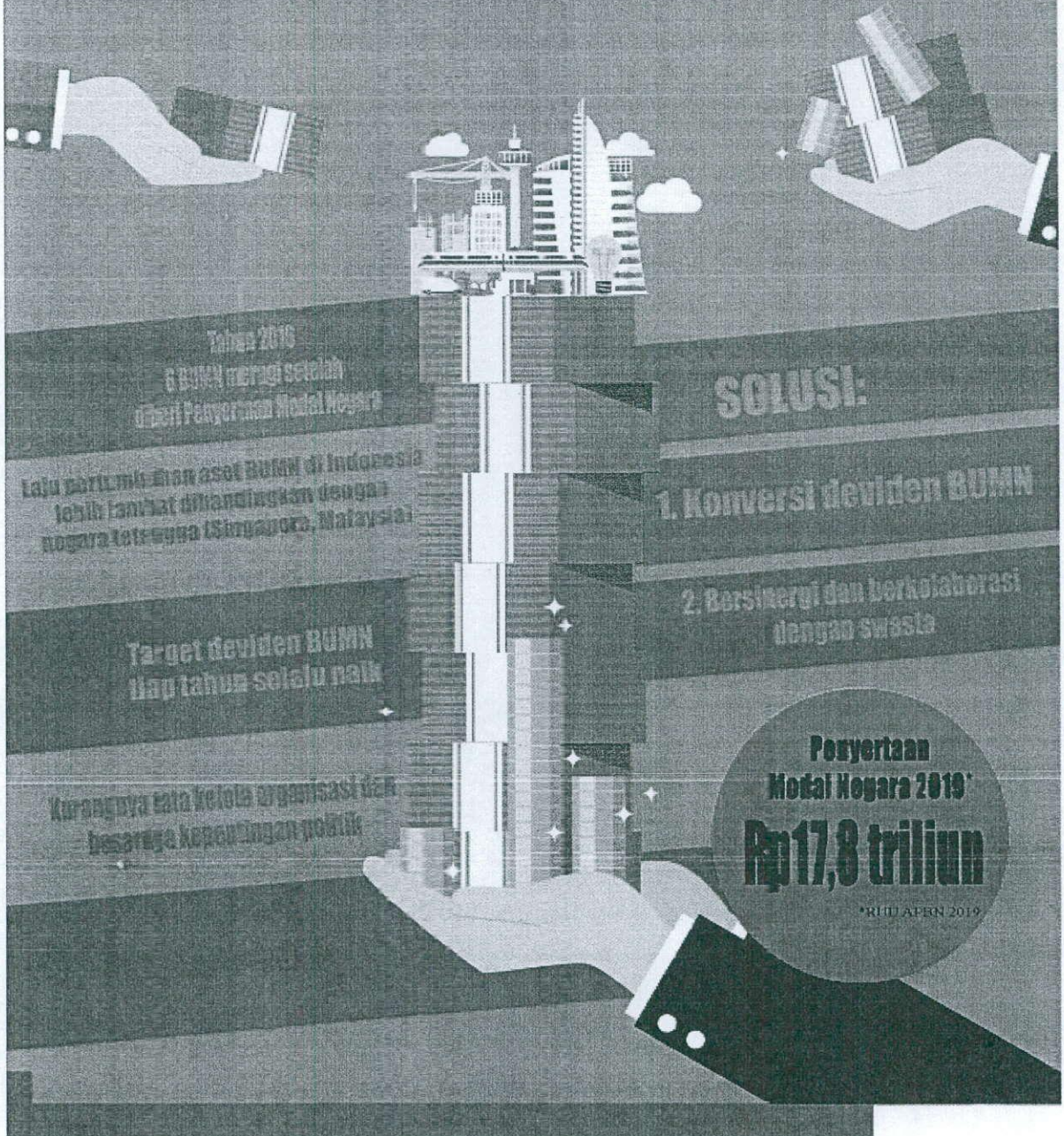


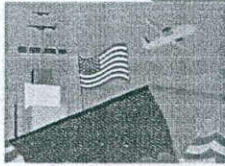
Kendala Realisasi DAK Fisik



PILKADA :
Perubahan kepala daerah berclampak
pada kebijakan kontrak proyek infrastruktur.

Menimbang Efektifitas Penyertaan Modal Negara Untuk BUMN





PELUANG

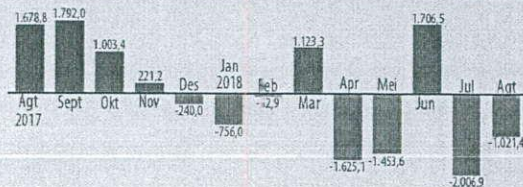
1. Menambah jumlah ekspor komoditas unggulan Indonesia ke AS dan Tiongkok
2. Diversifikasi produk ekspor ke AS dan Tiongkok
3. Peluang penurunan harga komoditas dari AS dan Tiongkok

HAMBATAN

1. Persaingan dengan negara eksportir lain di ASEAN (Thailand, Vietnam, Malaysia)
2. Ketergantungan material untuk faktor produksi yang bersumber dari luar negeri
3. Kualitas produk olahan masih kalah dengan negara eksportir lain



Neraca Nilai Perdagangan Indonesia, Agustus 2017–Agustus 2018



(Juta US\$)

Keterangan: *) Angka sementara

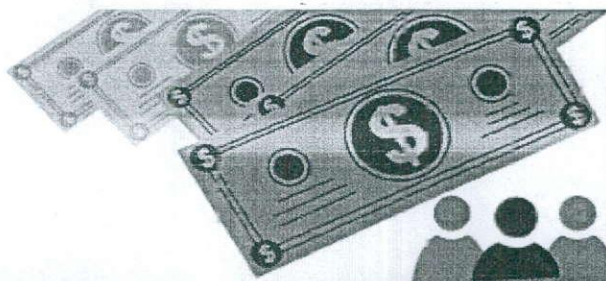
EKSPOR NON MIGAS

TIONGKOK	2.108,2
AMERIKA SERIKAT	1.596,7
JEPANG	1.483,9
INDIA	1.259,7

IMPOR NON MIGAS

TIONGKOK	3.948,7
JEPANG	1.531,2
THAILAND	952,2
SINGAPURA	868,1

Dana Desa Untuk Swasembada



1

Tentang Dana Desa

Dana desa diformulasi untuk mendukung pemerataan pembangunan, percepatan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di desa.



Penerima aliran dana desa menggunakan lebih dari 30 persen dananya untuk membiayai infrastruktur.

Realisasi Penggunaan Dana Desa

2

3

Dana Desa Untuk Kesejahteraan Petani

Dana desa seharusnya bisa lebih dimanfaatkan untuk mendorong produktifitas petani, dimana mereka adalah penduduk mayoritas di desa.



Jika produktifitas petani di desa meningkat maka target swasembada pangan akan mudah terealisasi

Dana Desa dan Swasembada Pangan

4

5

Mendirikan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai wadah pengelolaan dana sekaligus agen penyaluran modal usaha sektor-sektor pangan



Pemerintah dapat memberikan bantuan permodalan, pelatihan pembukuan, manajemen logistik dan distribusi untuk mendukung BUMDes

Peran Pemerintah

6



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

LAMPIRAN KEGIATAN 6

Publikasi Analisis Ringkas Cepat


TANDA TERIMA

Analisis Ringkas Cepat yang terdiri dari:

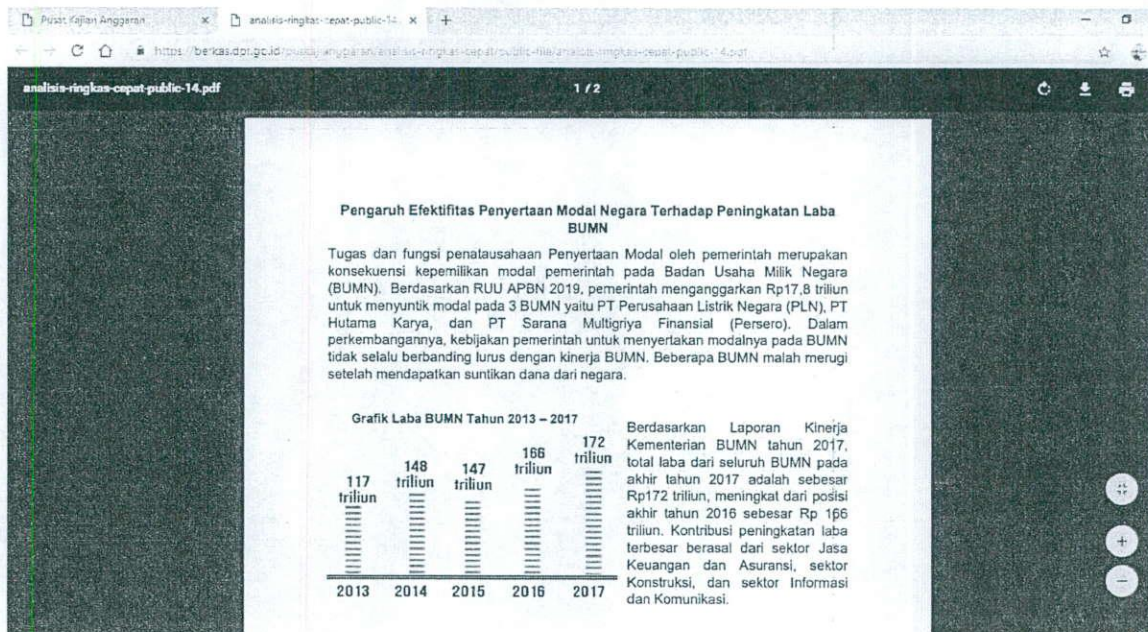
1. Analisis PMN pada LPEI dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Ekspor Indonesia;
2. Optimalisasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Catastrophic pada Kementerian Kesehatan Untuk Menciptakan Anggaran Kesehatan yang Kredibel;
3. Optimalisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat dalam Bentuk Belanja Modal untuk Mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas;
4. Focus pada Anggaran Promosi dan Pengembangan Pariwisata yang Berkualitas dalam RAPBN 2019 Sebagai Sumber Devisa
5. Evaluasi Dampak Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap Perekonomian dan Produksi Tembakau Domestik

Infografis yang terdiri dari:

1. Menimbang efektifitas penyertaan modal negara untuk BUMN

FRAKSI	NAMA PENERIMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
BADAN ANGGARAN	APU	27/9 2010	

Analisis Ringkas Cepat yang sudah diupload ke website Pusat Kajian Anggaran



LAMPIRAN KEGIATAN 7

*Pembuatan database terkait Laporan Semester
APBN (Data base Rencana Kerja pemerintah)*

File Rencana Kerja Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah									
No	Tahun	Bidang Prioritas Pembangunan Nasional				Pembangunan Setiap Bidang			
1	2018	Pendidikan	Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang		Revolusi Mental				
		Kesehatan			Pengarusutamaan Gender (PUG)				
		Perumahan dan Permukiman			Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan				
		Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata			Pembangunan Lintas Bidang Perubahan Iklim				
		Ketahanan Energi			Pemerataan Antarkelompok Pendapatan				
		Ketahanan Pangan			Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
		Penanggulangan Kemiskinan			Kependudukan dan Keluarga Berencana				
		Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman			Kesehatan				
		Pembangunan Wilayah			Pendidikan				
		Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama			Perpustakaan			
		Asian Games dan Asian Para Games 2018				Pemuda dan Olahraga			
						Agama			
						Kebudayaan			
						Kepulauan			
RKP 2018	RKP 2017	RKF 2016	RKP 2015	RKP 2014	RKP 2013	RKP 2012	RKP 2011	+	←

A	B	C	D	E	F	G	H
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2018 BERDASARKAN SURAT BERSAMA MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS DAN MENTERI KEUANGAN O. 5-593/MK.02/2017 DAN 291/M.PPN/D.8, KU.01.01/07/2017 TENTANG PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PENYELESAIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2018							
DDE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU (Rp Miliar)					
01	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT						
01.01	Program Dukur san Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	1.521					
01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR		00				
01.06	Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannnya	7.847					
	PAGU ANGGARAN *)	9.528					
02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT						
02.01	Program Dukur san Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat	1.0474					
02.09	Program Peningkatan Kelembagaan DPR RI	2.6506					
02.10	Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	5.556					
02.11	Program Dukur san Keahlian Fungsi Dewan		511				
	PAGU ANGGARAN *)	5.7283					
04	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN						
04.01	Program Dukur san Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	7.986					
04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK		00				
04.03	Program Peningkatan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK		00				
04.06	Program Kemitraan Kerjasama Negara/ Daerah, Pengembangan dan Pelayanan		00				
04.07	Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan		00				
04.08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	2.0713					
	PAGU ANGGARAN *)	2.8405					
05	MAHKAMAH AGUNG						
05.01	Program Dukur san Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah	7.1322					
05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	5.952					

Nama : Slamet Dhul Fadli, S.E.
Jabatan/NIP : CPNS Analis APBN Ahli Pertama/199405272018011003
Judul Kegiatan Aktualisasi : OPTIMALISASI ANALISIS RINGKAS CEPAT YANG KOMPREHENSIF TERKAIT SIKLUS LAPORAN SEMESTER APBN

Testimoni:

Presentasi yg dilakukan cukup menarik, tapi dari paparan yg diberikan
yg rekomendasinya mohon diberikan masukan yg jg. penerapannya.
Dan kedepannya yg pembahasan topik APC agar lebih baik
yg drangef topik yg sedang update

TTD,


Laras L.


LEMBAR TESTIMONI

Nama : Slamet Dhul Fadli, S.E.
Jabatan/NIP : CPNS Analis APBN Ahli Pertama/199405272018011003
Judul Kegiatan Aktualisasi : OPTIMALISASI ANALISIS RINGKAS CEPAT YANG KOMPREHENSIF TERKAIT SIKLUS LAPORAN SEMESTER APBN

Testimoni:

Berdasarkan presentasi yang sudah dilakukan, data
untuk PMN cepat Pertamina, PLN, & Garuda Indonesia
sudah baik, tapi alangkah lebih baik jika data
BUMN yang mengalami defisitnya ditambahkan
agar hasil kesimpulan dan rekomendasi
lebih akurat dan relevan.

Dan secara keseluruhan hasilnya sudah baik.

TTD,

Firly


LEMBAR TESTIMONI

Nama : Slamet Dhul Fadli, S.E.
Jabatan/NIP : CPNS Analis APBN Ahli Pertama/199405272018011003
Judul Kegiatan Aktualisasi : OPTIMALISASI ANALISIS RINGKAS CEPAT YANG KOMPREHENSIF TERKAIT SIKLUS LAPORAN SEMESTER APBN

Testimoni:

APC yang dibuat sudah baik dan sesuai dengan isi sesuai
siklus Lapsem APBN.

TTD,






ERVITA WULOK ZAHARA

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Optimalisasi Analisis Ringkas Cepat Siklus Laporan Semester APBN 2018






Nama Peserta	:	Slamet Dhul Fadli, S.E.
NIP	:	19940527201801 1 003
Unit Kerja	:	Pusat Kajian Anggaran
Jabatan	:	Calon Analis APBN Ahli Pertama
Isu	:	Belum Optimalnya Kajian Tentang Isu Pembahasan Siklus Laporan Semester APBN
Siklus ARC	:	Laporan Semester I APBN 2018
Judul	:	Pembuatan Data Base Rencana Kerja Pemerintah 2008 - 2018

1) Kegiatan 1: Konsultasi dengan pimpinan terkait kegiatan aktualisasi





Penyelesaian Kegiatan : 30 Mei 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan 1. Menetapkan tanggal konsultasi 2. Koordinasi dengan sekretaris pimpinan 3. Konsultasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi	Membahas apa saja yg akan dikompilasi/ disajikan di data base. - Referensi data yg digunakan.		
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan dari Kapus.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Komunikasi dengan memperhatikan etika dan kesopanan (Etika Publik)		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		

Penguatan Nilai Organisasi	- Perencanaan yang matang terkait waktu dan teknis mengikuti rapat (Akuntabel);		
----------------------------	---	--	--

2) Kegiatan 2 : Mengikuti rapat siklus laporan semester APBN di Badan Anggaran






Penyelesaian Kegiatan : 17 Juli 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan 1. Konsultasi dengan mentor terkait arahan mengikuti rapat. 2. Mengikuti rapat siklus laporan semester APBN di Badan Anggaran			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Ringkasan / Notulensi Rapat;		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Mengikuti rapat dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik (Nasionalisme); Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan (Etika Publik).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.	memperkuat peran bank di PKA	
Penguatan Nilai Organisasi	- Perencanaan yang matang terkait waktu dan teknis mengikuti rapat (Akuntabel); - Datang ke tempat rapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Professional)		

- 3) Kegiatan 3 : Mengumpulkan data terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 sampai dengan 2018





Penyelesaian Kegiatan : 18 Juli 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan 1. Konsultasi dengan mentor untuk melanjutkan kegiatan 2. Mencari data pendukung terkait Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008 - 2018 3. Mengelompokkan data pendukung terkait terkait Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008 - 2018	mendiskusikan bentuk pengujian data		
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- File database Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008 - 2018.		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Mengumpulkan data yang valid untuk mendukung hasil analisis yang baik (Komitmen Mutu); - Sumber data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel)		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		


<p>Penguatan Nilai Organisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data yang dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan isu dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. (Akuntabel); -Sungguh-sungguh menjalankan tugas (Profesional). 		
-----------------------------------	--	--	--

- 4) Kegiatan 4 : Membuat data base Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008 sampai dengan tahun 2018

Penyelesaian Kegiatan : 18 Juli – 20 Agustus 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan 1. Konsultasi dengan mentor untuk arahan menganalisis data 2. Membuat <i>draft</i> awal data base Rencana Kerja Pemerintah			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- <i>Draft</i> awal data base Rencana Kerja Pemerintah		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Pembuatan <i>data base</i> yang dilakukan secara teliti dan rapi agar menghasilkan output yang mudah dipahami. (Komitmen Mutu) - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan (Etika Publik)		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		
Penguatan Nilai Organisasi	- Data yang disajikan bersumber dari data yang dapat di pertanggung jawabkan (Akuntabel); - Sungguh-sungguh menjalankan tugas (Profesional).		

Kegiatan 5 : Evaluasi *draft* data base Rencana Kerja Pemerintah

Penyelesaian Kegiatan : 20 Agustus – 25 September 2018	Catatan Mentor		Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan 1. Konsultasi dengan mentor untuk melanjutkan kegiatan 2. Mencatat masukan dan saran dari mentor terkait data base Rencana Kerja Pemerintah 3. Melaksanakan perbaikan <i>data base</i> Rencana Kerja Pemerintah			
	Penjelasan	Catatan Mentor	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	- Dokumen catatan saran dari mentor terkait perbaikan <i>data base</i> ;		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	- Mendengarkan masukan dan saran dari mentor demi perbaikan hasil <i>data base</i> RKP (Akuntabilitas); - Konsultasi dan diskusi dengan Mentor/Atasan (Etika Publik).		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperkuat visi Pusat Kajian Anggaran yang andal.		

<p>Penguatan Nilai Organisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data untuk pembuatan data base disajikan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel); - Sungguh - sungguh menjalankan tugas (Profesional). 		
-----------------------------------	--	--	---